

LAPORAN VERIFIKASI DATA BASE OMS



Tim Peneliti:

Khamid Anik Khamim Tohari
Sarwitri
Fahd Riyadi

2022

LAPORAN VERIFIKASI DATA BASE OMS

Tim Peneliti:

Peneliti utama:

1. Khamid Anik Khamim Tohari
2. Sarwitri
3. Fahd Riyadi

Analisis database:

Yusep Munawar Sofyan

Enumerator:

1. Nurul Azizah
2. Yudistira Nurbasya
3. Akhmad Rozak

NON

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Grafik	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Istilah	v
Kata Pengantar	vii
BAGIAN 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan, Keluaran dan Manfaat	2
BAGIAN 2: KERANGKA KONSEPTUAL	4
2.1 Definisi Lembaga Swadaya Masyarakat	4
2.2 <i>Good NGO Governance</i>	7
2.3 Akuntabilitas LSM	8
2.4 Standar Minimal Akuntabilitas LSM	10
2.5 Kerangka Operasional Kategori LSM	11
2.6 Pembatasan Penelitian	16
2.7 <i>Disclaimer</i>	17
BAGIAN 3: METODOLOGI	18
3.1 Metode Pengambilan <i>Raw Data</i> dan <i>Base Line Data</i>	18
3.2 Proses dan Waktu	19
BAGIAN 4: TEMUAN	21
4.1 Partisipasi Verifikasi Data OMS.....	21
4.2 Lembaga Non-OMS.....	28
4.3 Eksistensi Organisasi	30
4.4 Manajemen Organisasi	31
4.5 Legalitas Organisasi	32
4.6 Akuntabilitas Keuangan (Transparansi).....	35
4.7 Isu dan Kompetensi Organisasi	36
4.8 Transparansi Informasi	40
BAGIAN 5: ANALISIS TEMUAN	43
5.1 Analisis Isu Utama Organisasi berdasarkan Cakupan Area Kerja	43
5.2 Grade Organisasi.....	47
5.2.1 Organisasi Kategori <i>Grade A</i>	48

5.2.2 Organisasi Kategori <i>Grade B</i>	50
5.2.3 Organisasi Kategori <i>Grade C</i>	53
5.2.4 Organisasi Kategori <i>Grade D</i>	54
5.3 Analisis Antar <i>Grade</i>	
BAGIAN 6: TANTANGAN, KESIMPULAN, DAN REKOMENDASI	59
6.1 Tantangan	59
6.2 Kesimpulan	59
6.3 Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Kerangka Konsep Verifikasi Data OMS	12
Grafik 2.2 Operasionalisasi Indikator Standar Akuntabilitas dan Good NGO Governance Menjadi <i>Grade</i>	16
Grafik 3.1 Proses dan Waktu Penelitian	19
Grafik 3.2 Visibilitas Informasi Verifikasi Data OMS	20
Grafik 4.1 Sebaran Partisipasi Lembaga Berdasarkan Provinsi	26
Grafik 1.2 Partisipasi Lembaga Berdasarkan Kabupaten-Kota	27
Grafik 4.3 Sebaran Lembaga Non-OMS (Provinsi)	28
Grafik 4.4 Sebaran Data Aktual Lembaga Berdasarkan Provinsi	30
Grafik 4.5. Eksistensi Lembaga Berdasarkan Usia	31
Grafik 4.6 Bentuk Organisasi	32
Grafik 4.7 Kepemilikan Legalitas Organisasi	32
Grafik 4.8 Lembaga yang Memiliki SKT Berdasarkan Provinsi	33
Grafik 4.9 Lembaga yang Memiliki AHU Berdasarkan Provinsi	34
Grafik 4.10 Lembaga yang Memiliki SKT dan AHU	35
Grafik 4.11 Fokus Isu Organisasi	37
Grafik 4.12 Isu Lembaga Lainnya	39
Grafik 4.13 Kompetensi Lembaga	40
Grafik 4.14. Visibilitas Lembaga	41
Grafik 5.1 Sebaran Organisasi Berdasarkan Cakupan Area Kerja untuk Isu Kesehatan Menurut Provinsi	45
Grafik 5.2 Fokus Isu Lembaga di Provinsi Bali (Contoh)	46
Grafik 5.3 Isu Lainnya dari OMS di Provinsi Bali	47
Grafik 5.4 Jumlah dan Persentase Grade Organisasi	48
Grafik 5.5 OMS <i>Grade A</i> Berdasarkan Provinsi	49
Grafik 5.6 Fokus Isu Organisasi Kategori <i>Grade A</i>	50
Grafik 5.7 OMS <i>Grade B</i> Berdasarkan Provinsi	51
Grafik 5.8 Fokus Isu Organisasi Kategori <i>Grade B</i>	52
Grafik 5.9 OMS <i>Grade C</i> Berdasarkan Provinsi	53
Grafik 5.10 Fokus Isu Organisasi <i>Grade C</i>	54
Grafik 5.11 OMS <i>Grade D</i> Berdasarkan Provinsi	55
Grafik 5.12 Fokus Isu OMS <i>Grade D</i>	56
Grafik 5.13 Analisis 709 Lembaga antar <i>Grade</i>	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Empat Rumput Verifikasi Data OMS dan Indikator Pertanyaan	13
Tabel 2.2 Indikator Standar Maksimal Grading berdasarkan Akuntabilitas dan <i>Good NGO Governance</i>	14
Tabel 4.1 Matrik Perjalanan Data	21
Tabel 4.2 Matrik Partisipasi OMS	22
Tabel 4.3 Proses Partisipasi Verifikasi Data OMS per Provinsi	23
Tabel 4.4 Matrik Journey Data OMS Yang Mengikuti Verifikasi Aktual	25
Tabel 4.5 Pertanyaan Manajemen Organisasi	31
Tabel 4.6 Akuntabilitas Keuangan	36
Tabel 4.7 Transparansi Informasi	41
Tabel 5.1 Sebaran Isu 9 Utama per Provinsi	43
Tabel 5.2 Sebaran 709 Lembaga Berdasarkan <i>Grade</i>	44

DAFTAR ISTILAH

OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
Ormas	: Organisasi Kemasyarakatan
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
RI	: Republik Indonesia
UUD	: Undang Undang Dasar
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
UU	: Undang-Undang
Ornop	: Organisasi non pemerintah
NGO	: <i>Non-Government Organization</i>
PVO	: <i>Private Voluntary Organization</i>
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
LPSM	: Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
YTKI	: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia
Inmendagri	: Instruksi Menteri dalam Negeri
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
AD	: Anggaran Dasar
ART	: Anggaran Rumah tangga
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
AHU	: Administrasi Hukum Umum
SKT	: Surat Keterangan Terdaftar
SOP	: Standar Operasional Prosedur
MEL	: <i>Monitoring, Evaluation, and Learning</i>
Medsos	: Media Sosial
CP	: <i>Contact Person</i>
Pokja	: Kelompok Kerja
Perpres	: Peraturan Presiden
IKO	: Indeks Kinerja Organisasi
IKA	: Indonesia untuk Kemanusiaan
OBH	: Organisasi Bantuan Hukum
INFID	: <i>International NGO Forum on Indonesian Development</i>
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Babel	: Bangka Belitung
JARAK	: Jaringan LSM untuk Penanggulangan Pekerja Anak

HP	: <i>Hand Phone</i>
IG	: Instagram
Remdec	: <i>Resource Management and Development Consultant</i>
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
PAPDA	: Paguyuban Putra Daerah
NU	: Nahdlatul Ulama
KADIN	: Kamar Dagang dan Industri Indonesia
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
PT	: Perseroan Terbatas
PD	: Perusahaan Daerah
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PKBI	: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
JIP	: Jaringan Indonesia Positif (JIP)
PIC	: <i>Person in Charge</i>
NAD	: Nangroe Aceh Darusalam
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
IU	: Isu Utama

KATA PENGANTAR

Organisasi Masyarakat Sipil adalah bagian dari pilar demokrasi negara dan agen perubahan sosial. Peran OMS dalam rancang-bangun demokrasi Indonesia tak terbantahkan. Peran ini juga telah direkognisi oleh para penyelenggara negara dalam berbagai kesempatan.

Namun, organisasi masyarakat sipil di Indonesia sedang menghadapi tantangan untuk keberlanjutan organisasi, khususnya untuk mampu melakukan penggalangan dana domestik yang akan mengurangi ketergantungannya terhadap lembaga-lembaga donor internasional. Ketergantungan kepada lembaga donor internasional dalam pendanaan OMS menjadi masalah besar saat ini. Sejumlah studi menunjukkan bahwa 85-90% dana OMS berasal dari pendanaan donor (Cardno, 2020).

Tema keberlanjutan keuangan OMS kemudian menjadi isu populer dalam berbagai diskusi di Indonesia selama dua dekade terakhir. Sokongan pendanaan dari mitra pembangunan atau lembaga donor internasional secara besar-besaran dialami OMS Indonesia di era awal Reformasi. Berbagai bantuan donor internasional datang dalam kerangka mendukung upaya demokratisasi, dengan OMS sebagai aktor utama penggerak perubahan. Hingga lebih dari satu dekade kemudian, seiring dengan masuknya keanggotaan Indonesia ke dalam kategori negara berpendapatan menengah, secara perlahan bantuan pembangunan terus menurun dan tidak lagi menempatkan Indonesia sebagai negara prioritas penerima bantuan pembangunan utama. Apalagi ketika Indonesia dipercaya memegang presidensi G-20.

Berbagai pihak mencoba merumuskan alternatif sumber pendanaan untuk OMS agar keberlanjutan ini terjaga. Begitu juga dengan pemerintah. Dari sumber pendanaan pemerintah, terdapat beberapa peluang bagi LSM antara lain melalui skema anggaran bantuan bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Kementerian Hukum dan HAM yang dimulai sejak tahun 2013 dan kebijakan skema pendanaan Swakelola Tipe 3 dalam pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2018. Sementara itu, sumber pendanaan dari perusahaan melalui program tanggung-jawab sosial perusahaan dinilai belum efektif dalam mendukung kerja-kerja LSM. Beragam sumber pendanaan lokal tersebut disertai tantangan yang kompleks, di antaranya masalah akses dan birokrasi, hingga ketersediaan anggaran yang masih sangat minim. Sebagian besar instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah bahkan belum menyediakan anggaran untuk kerja sama dengan LSM.

Isu yang tak kalah penting dalam konteks ini adalah akuntabilitas OMS. Meski peran OMS diakui strategis dalam proses demokratisasi, namun tingkat kepercayaan publik

terhadap kompetensi OMS rendah. Edelman Trust Barometer tahun 2021 mencatat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap OMS berada di angka 70%, lebih rendah dari tingkat kepercayaan terhadap pemerintah (76%) dan bisnis (81%).

Karena itu, isu akuntabilitas, kompetensi, dan tata kelola organisasi menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari isu keberlanjutan OMS. Upaya diversifikasi pendanaan OMS, misalnya, harus dibarengi dengan upaya untuk memperkuat akuntabilitas, kompetensi, dan tata kelola organisasi masyarakat sipil.

Penelitian awal ini adalah bagian dari upaya tersebut. Agenda penguatan masyarakat sipil yang sedang digagas oleh pemerintah melalui Dana Abadi OMS harus memiliki basis pijakan data solid yang memotret kondisi faktual tingkat keberdayaan OMS.[]

Tim Peneliti

BAGIAN 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Organisasi Masyarakat Sipil memiliki peran penting dalam pembangunan dan demokratisasi, menurut Gaffar (2002) dan Anwar (2011) ada 3, yaitu: 1) sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*); 2) sebagai pelaku advokasi kebijakan publik (*public policy advocacy*); dan 3) sebagai pelaku kontrol sosial (*social control*). Ketiga peran penting OMS tersebut merupakan contoh real dari praktik konstitusional demokratis yang selama ini telah dijalankan oleh OMS. Hal inilah yang membuat Organisasi Masyarakat Sipil penting untuk dijaga keberlanjutannya dalam sistem pemerintahan demokratis.

OMS merupakan bagian dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri RI, per 18 Maret 2022 tercatat ada 473.655 organisasi, yang terdiri dari 2.601 organisasi tercatat di Kemendagri (memiliki SKT), tercatat di Kemenkumham sebanyak 470.996 organisasi, terdiri dari Badan Hukum Yayasan sebanyak 275.530 dan Badan Hukum Perkumpulan sebanyak 195.400, dan tercatat di Kemenlu (Ormas Asing) sebanyak 58 organisasi.

Persoalan terbesar yang dihadapi oleh OMS di Indonesia adalah keterbatasan sumber pendanaan dan tata kelola organisasi. Status Indonesia sebagai *middle-up income country* turut berpengaruh terhadap berkurangnya donor internasional yang bekerja di Indonesia. Padahal sumber pendanaan terbesar OMS berasal dari donor luar negeri. Kondisi ini semakin diperburuk dengan kapasitas organisasi yang berkecenderungan masih berada pada tingkat tumbuh walau sudah lama bekerja. Pandemi covid 19 juga sangat berpengaruh pada ketahanan OMS.

Salah satu peluang pendanaan bagi OMS yang berkelanjutan bersumber dari pemerintah. Dalam beberapa program, pemerintah telah mengalokasikan pendanaan yang dapat diakses oleh OMS melalui program dan kebijakan tertentu, seperti hibah kepada organisasi berbasis keagamaan, organisasi pembinaan olahraga, dan

Organisasi Bantuan Hukum. Namun sebagian besar OMS belum memiliki akses pendanaan tersebut karena kendala legalitas dan akuntabilitas organisasi.

Keterlibatan OMS untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar kerja kolaboratif antara pemerintah dan OMS. Untuk mewujudkan kerja kolaboratif yang bertanggung jawab, baik pemerintah maupun OMS harus akuntabel. Akuntabilitas OMS menjadi aspek penting dalam hal ini.

Untuk mendukung gerakan keberlanjutan OMS dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia (saat ini) pemerintah sedang menyiapkan sebuah kebijakan tentang dana abadi OMS.¹ Pelaksanaan dana abadi ini tentunya meyakini persyaratan bagi OMS yang mengaksesnya. Untuk menjawab kebutuhan ini, Bappenas bekerja sama dengan peneliti Konsil LSM Indonesia melakukan verifikasi data OMS di Indonesia berbasis online.

1.2 Tujuan, Keluaran dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Verifikasi data base OMS ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi sebaran eksistensi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia;
2. Mendapatkan peta data tingkat akuntabilitas dan kualitas tata kelola organisasi yang diterapkan oleh OMS di Indonesia;
3. Mendapatkan data dan informasi mengenai ragam dan isu OMS di Indonesia;
4. Mendapatkan data awal tingkat ketahanan masyarakat sipil di Indonesia.

¹ Dalam proses penyempurnaan draft Rancangan Peraturan Presiden oleh Bappenas, penyebutan Dana Abadi OMS berubah menjadi Dana Abadi Ormas.

1.2.2 Keluaran dan Manfaat

Hasil verifikasi data base OMS ini adalah laporan data base OMS yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dan acuan untuk agenda verifikasi lebih lanjut dalam kerangka kebijakan Dana Abadi OMS, yakni:

1. Untuk melakukan verifikasi faktual data base OMS;
2. Untuk membangun tools dan mekanisme verifikasi dan pemetaan kapasitas OMS yang bisa direplikasi lebih luas;
3. Untuk menjadi rujukan ataupun pertimbangan dalam menyusun kebijakan teknis dalam mekanisme seleksi OMS.

BAGIAN 2

KERANGKA KONSEPTUAL



2.1 Definisi Lembaga Swadaya Masyarakat

Salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 adalah kebebasan berkumpul dan berserikat seperti diatur dalam Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Landasan inilah yang mendasari lahir dan berkembangnya organisasi di Indonesia.

Salah satu lembaga yang paling banyak didirikan oleh masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas). Terkait Ormas, pemerintah telah mengeluarkan aturan khusus yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam UU No. 17 tahun 2013 Ormas didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Bab 1, Pasal 1 ayat 1 UU Ormas).

Lebih lanjut UU Ormas juga menjelaskan soal ciri-ciri Ormas yakni mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain ciri, dalam UU Ormas juga dijelaskan soal sifat yang melekat pada Ormas, yakni kesukarelaan, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Dengan merujuk definisi dari UU Ormas ini, bisa dipastikan hampir semua bentuk organisasi yang didirikan oleh masyarakat masuk dalam kategori Ormas. Padahal antara satu bentuk organisasi dengan organisasi lainnya terdapat perbedaan yang mendasar.

Salah satu bentuk organisasi yang memiliki karakteristik tersendiri adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Istilah LSM sering juga disebut sebagai organisasi non

pemerintah (Ornop) atau dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization (NGO)*². Istilah Ornop ini mulai dikenal pada tahun 1970-an. Namun penamaan Ornop ini terlalu luas sebab organisasi non pemerintah juga meliputi organisasi bisnis serta organisasi masyarakat lainnya yang bukan pemerintah. Beberapa penamaan lain untuk Ornop adalah PVO (*private voluntary organization*), CSO (*Civil Society Organization*) dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM).

Istilah PVO pertama kali populer di Amerika. Penamaan ini terutama digunakan oleh USAID serta Bank Dunia. Rajesh Tandon menyebut PVO dalam teori “tiga sektor”, yakni pemerintah, bisnis atau korporasi, serta organisasi *voluntary* (kerelawanan).

Sedangkan istilah Civil Society Organizations (CSOs), jika merujuk UNDP, didefinisikan sebagai: *non-state actors whose aims are neither to generate profits nor to seek governing power. CSOs unite people to advance shared goals and interests.*³ Organisasi Masyarakat Sipil memiliki peran penting dalam pembangunan dan demokratisasi, menurut Gaffar (2002) dan Anwar (2011) ada 3, yaitu: 1) sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*); 2) sebagai pelaku advokasi kebijakan publik (*public policy advocacy*); dan 3) sebagai pelaku kontrol sosial (*social control*). Peran-peran tersebut bisa kita lihat dari kerja-kerja OMS di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Selain PVO dan CSO, juga dikenal istilah Lembaga Pemberdayaan Swadaya Masyarakat (LPSM). Istilah LPSM muncul pertama kali dalam lokakarya “Kerjasama Terpadu untuk Pengembangan Pedesaan” yang diselenggarakan Bina Desa, 13-15 April 1978 di Ungaran, Bali. Istilah LPSM digunakan secara terbatas untuk lembaga atau organisasi yang secara langsung bergerak membina pengembangan masyarakat.

Penamaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sendiri untuk pertama kali muncul dalam seminar Ornop di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia tahun 1980 atas inisiatif Bina Desa, Walhi dan YTKI. Penamaan LSM ini digunakan untuk mengganti istilah Ornop yang selama ini diasosiasikan sebagai organisasi yang “berlawanan dengan pemerintah” atau oposan pemerintah (Witoelar, 1981 dalam Anggara 2008).

² NGO sendiri di negara-negara Barat baru muncul sekitar tahun 1950-1960. Awalnya NGO hanya mengurus bantuan kederewanan. Perkembangan selanjutnya, terutama tahun 1970, seiring dengan mengalirnya bantuan asing serta utang luar negeri ke negara-negara berkembang peran NGO semakin terlihat. Secara umum NGO dibedakan pada dua bagian besar, yakni NGO yang berorientasi aksi atau program dan NGO yang berfungsi sebagai Lembaga donor. Krisna Anggara, *Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Tesis, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008). H. 19

³ UNDP. *UNDP and Civil Society Organizations: A Toolkit for Strengthening Partnerships*, (New York: NY, 2006)., page. 3

Dalam lembar ketatanegaraan, istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) muncul pertama kali dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama dalam Bab 1, Pasal 1 poin 12, serta pasal 19. Seperti dijelaskan dalam pasal 1 poin 12, Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, di tengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Dalam UU ini hanya dijelaskan LSM yang bergerak di bidang lingkungan atau isu lingkungan hidup.

Penamaan Lembaga Swadaya Masyarakat juga ditemukan dalam Instruksi Menteri dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8 tahun 1990. Dalam peraturan tersebut LSM didefinisikan sebagai organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Dari beberapa definisi di atas, bisa digarisbawahi bahwa LSM adalah organisasi non pemerintah, tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, serta bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti dijelaskan oleh M. M. Billah (1990 dalam Anggara, 2008) LSM di Indonesia memiliki ciri-ciri: berorientasi pada peningkatan kelompok komunitas, memiliki komitmen pada partisipasi rakyat, adanya hubungan silang antara pribadi dan kelembagaan yang saling mendukung, yakni adanya pertukaran gagasan dan sumber daya. Dalam beberapa kasus, seperti ditegaskan oleh George Junus Aditjondro (dalam Budairi 2002), istilah LSM diberikan pada semua organisasi yang melakukan oposisi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Dari beberapa penjelasan dan definisi tersebut, dalam laporan ini yang dijadikan rujukan dalam mengidentifikasi LSM/OMS adalah lembaga-lembaga dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terorganisir (*organized*); terinstitusionalisasi dari sudut bentuk organisasi dan sistem operasinya
2. Bukan negara (*private*); secara institusi bukan bagian dari negara atau pemerintah
3. Tidak berorientasi profit (***non-profit distributing***); tidak berorientasi menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau para direktornya, tetapi mengembalikan pendapatannya untuk kepentingan misinya.
4. Swadaya (*self-governing*); mempunyai sistem untuk mengatur dirinya sendiri
5. Kesukarelaan (*voluntary*); melibatkan partisipasi sukarela dalam operasi ataupun manajemen organisasi.

6. Tidak berafiliasi dengan partai politik
7. Tidak berdasarkan agama tertentu (*religious based organization*)

2.2 Good NGO Governance

Good governance berarti pembagian kewenangan pengambilan keputusan agar kekuasaan dan sumber daya tidak menumpuk di tangan individu atau kelompok tunggal (Juliet K. Bucoy, 2011). Bucoy menekankan bahwa tata Kelola LSM yang baik harus didasarkan pada perbedaan antara entitas organisasi (manajemen dan badan pengatur) dan distribusi kekuatan pengambil keputusan di antara pemangku organisasi. Pengaturan ini akan sangat membantu dalam menahan atau memoderasi kontrol agar sumber daya organisasi dikelola dengan baik dan menjaga orientasi pelayanan publik tetap berjalan (Juliet Bacoy, 2011).

Dalam implementasinya, *good NGO governance* dijadikan mekanisme untuk mengatur tata kelola LSM agar sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yakni mendorong LSM bersifat transparan dan terbebas dari korupsi (Lussy dan Eka, 2018).

Adapun prinsip *good governance* seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 terdiri dari: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, dan supremasi hukum.

Seperti dijelaskan oleh Lusi, dkk (2005), tata kelola LSM yang baik (*good NGO governance*) memiliki beberapa unsur. Adapun unsur-unsur dalam tata Kelola LSM yang baik meliputi:

1. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
2. Adanya sistem akuntansi, penganggaran, dan audit yang baik.
3. Ditegakkannya kebijakan kelembagaan dan sistem mekanisme *check and balance* yang tepat.
4. Sistem pengambilan keputusan, perencanaan dan monitoring/evaluasi yang baik.
5. Akuntabilitas sosial terhadap mitra dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain syarat, LSM juga perlu memiliki kinerja tata kelola yang baik, mencakup: visi, misi, tujuan; sistem tata-kelola kelembagaan; administrasi dan manajemen keuangan, pelaksanaan program; dan kemitraan dan jaringan (Lusi, dkk, 2005: 30).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, akuntabilitas merupakan bagian integral dari prinsip *good NGO governance*. Dalam praktiknya, akuntabilitas ini terus dikembangkan menjadi salah satu pondasi LSM dalam beraktivitas.

2.3 Akuntabilitas LSM

Salah satu poin penting kuatnya fondasi LSM adalah adanya nilai-nilai serta kesungguhan dalam memperjuangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Secara umum nilai yang diyakini dan menjadi prinsip dasar yang dianut oleh organisasi seperti dijelaskan oleh Lusi (2015: 74) diantaranya: anti-kekerasan, penghargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan gender, pencegahan konflik kepentingan. Ciri-ciri tersebut menjadi standar minimal untuk membedakan LSM dari organisasi masyarakat (Ormas) lainnya.

Keyakinan atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh organisasi inilah yang dinamakan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu proses di mana suatu organisasi menganggap dirinya bertanggung jawab secara terbuka mengenai apa yang diyakininya, apa yang dilakukan, dan yang tidak dilakukannya (Lusi, dkk, 2015: 20).

Dalam praktiknya, proses akuntabilitas melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*), diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*) dan cepat tanggap (*responding*) (Lusi, dkk, 2015: 20-21).

Berikut 4 klasifikasi akuntabilitas (Lusi, dkk, 2015: 21):

- **Akuntabilitas keuangan;** yaitu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya (dana) yang diperoleh dan dipercayakan kepadanya.
- **Akuntabilitas kinerja;** mendokumentasikan dan melaporkan hasil-hasil yang diperoleh dibandingkan dengan standar-standar kualitas, sasaran, tujuan serta harapan-harapan yang ingin dicapai
- **Akuntabilitas ucapan,** kejujuran dan ketelitian mengenai apa yang disuarakan serta mempunyai otoritas untuk menyuarakannya.
- **Akuntabilitas untuk meningkatkan diri,** tanggap terhadap umpan-balik, melakukan evaluasi/*assessment* dan melaporkan tindakan-tindakan yang diambil.

Dalam konteks tersebut akuntabilitas LSM tidak hanya dijadikan sarana bagi LSM untuk bertanggung jawab atas tindakannya, baik yang berkaitan dengan hukum maupun kewajiban lainnya seperti memberikan informasi yang utuh tapi juga mengikat individu pegiat LSM untuk turut serta secara dalam membentuk misi dan nilai-nilai organisasi, membuka diri atas pengawasan publik, serta menilai kinerja dalam kaitannya dengan tujuan organisasi (Lusi, dkk, 2015: 23).

Secara prinsip, akuntabilitas meliputi empat dimensi (Lusi, dkk, 2015: 21-22), yaitu:

Pertama, transparansi. Dalam konteks organisasi, transparansi berarti organisasi memberikan informasi yang cukup dan berkualitas serta tersedianya media untuk penyebarannya. Hal ini bertujuan agar pemangku kepentingan memiliki akses dan informasi yang cukup untuk mengetahui serta bisa memantau kegiatan dan kinerja organisasi. Ketercukupan informasi tersebut meliputi: visi, misi, tujuan dan program organisasi, jumlah dan sumber dana, struktur organisasi dan susunan pendiri, pengurus dan pelaksana organisasi, serta laporan keuangan. Informasi dapat berupa laporan tahunan, profil organisasi, hasil evaluasi untuk publik, serta keuangan.

Kedua, partisipasi, yakni pelibatan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal oleh organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini seperti melibatkan pengurus, eksekutif dan staf serta wakil-wakil dari mitra dalam menyusun perencanaan strategis (renstra) untuk menyusun visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan program strategis organisasi. Melibatkan calon penerima manfaat (*beneficiaries*) dalam penyusunan proposal proyek melalui *need assesment* dengan melakukan pengumpulan data lapangan; Survei, FGD, wawancara dan lainnya.

Ketiga, evaluasi. Adanya alat dan prosedur untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

Keempat, tersedianya mekanisme pengaduan (*complaint mechanism*) di dalam organisasi yang memungkinkan pemangku kepentingan terutama masyarakat umum mengajukan keluhan terhadap keputusan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi. Selain itu mekanisme pengaduan ini juga harus menjamin adanya pembahasan dan tindakan yang akan diambil untuk menanggapi dan atau mengoreksi keluhan tersebut.

Bagi LSM, akuntabilitas ini sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik secara luas atas kerja-kerja LSM. Seperti ditegaskan Lusi dkk (2015), setidaknya ada 5 poin pentingnya akuntabilitas bagi LSM:

1. Meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi kepada LSM sebagai institusi publik dan organisasi masyarakat sipil (*civil society*).
2. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik bahwa komunitas LSM mempunyai standar moral dan integritas yang tinggi serta perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dihargai dan dihormati.
3. Menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa LSM adalah organisasi yang memiliki tata kelola yang baik, demokratis, profesional, menjalankan program dengan kualitas dan kapabilitas yang tinggi, mengelola sumberdaya secara efektif, efisien dan bertanggung jawab sehingga terhindar dari tindak korupsi dan praktik negatif lainnya.

4. Meningkatkan posisi tawar terhadap pihak luar seperti pemerintah, pihak swasta, lembaga donor, dan lain-lain.
5. Dengan meningkatnya akuntabilitas, maka kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan akan meningkat, dan posisi tawar LSM terhadap pihak luar seperti pemerintah dan sektor swasta juga meningkat. Dengan meningkatnya posisi tawar, peran LSM yang merupakan salah satu komponen utama organisasi masyarakat sipil sebagai kekuatan penyeimbang terhadap peran negara (pemerintah) dan pasar (sektor swasta) dapat terwujud.

2.4 Standar Minimal Akuntabilitas LSM

Standar Minimal Akuntabilitas LSM merupakan tingkat kualitas praktik dasar atau minimal yang diperlukan LSM supaya menjadi organisasi yang akuntabel. Konsil LSM Indonesia mengembangkan standar minimal akuntabilitas LSM dengan dasar pemikiran bahwa LSM harus memiliki standar tinggi dalam seluruh aktivitasnya yang mengacu pada nilai, prinsip, aturan hukum, norma, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Standar minimal LSM ini dikembangkan dari beberapa dokumen yang sebelumnya dikembangkan di Indonesia⁴ dan juga beberapa standar yang sudah dirumuskan oleh LSM-LSM Internasional.⁵ Konsil LSM Indonesia merangkumnya menjadi 7 standar, yaitu:

1. **Tata kepengurusan yang baik.** Organisasi memiliki pengurus (*Board*) yang berfungsi mengurus organisasi sesuai dengan aturan organisasi dan aturan hukum;
2. **Manajemen staf yang profesional.** Organisasi memiliki proses yang tepat, jelas dan sistematis dalam melakukan rekrutmen dan manajemen staf;
3. **Manajemen keuangan yang terbuka dan terpercaya.** Organisasi memiliki manajemen keuangan yang sesuai dengan standar keuangan organisasi nirlaba;
4. **Partisipasi bermakna masyarakat dampingan dalam pengambilan keputusan strategi organisasi.** Organisasi melibatkan penerima manfaat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) program, dan pengambilan keputusan strategis organisasi;

⁴ Pedoman Perilaku Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (1999); Kode Etik Jaringan LSM Indonesia (2002); Transparansi dan Akuntabilitas NGO, Satunama bersama TIFA (2004); dan Panduan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan yang disusun oleh PIRAC, dkk (2013).

⁵ HAP, Standart in Accountability and Quality Management; OXFAM GB, Accountability Started Pack; dan Australia Council for International Development (ACFID).

5. **Penanganan pengaduan.** Organisasi memiliki proses penanganan pengaduan yang mudah diakses publik, terutama masyarakat penerima manfaat/dampingan;
6. **Transparansi informasi.** Organisasi mempublikasikan informasi secara jujur dan transparan tentang organisasi dan aktivitasnya;
7. **Pencegahan konflik kepentingan.** Organisasi memiliki kebijakan untuk mencegah konflik kepentingan karena relasi keluarga, dan kepentingan lainnya.

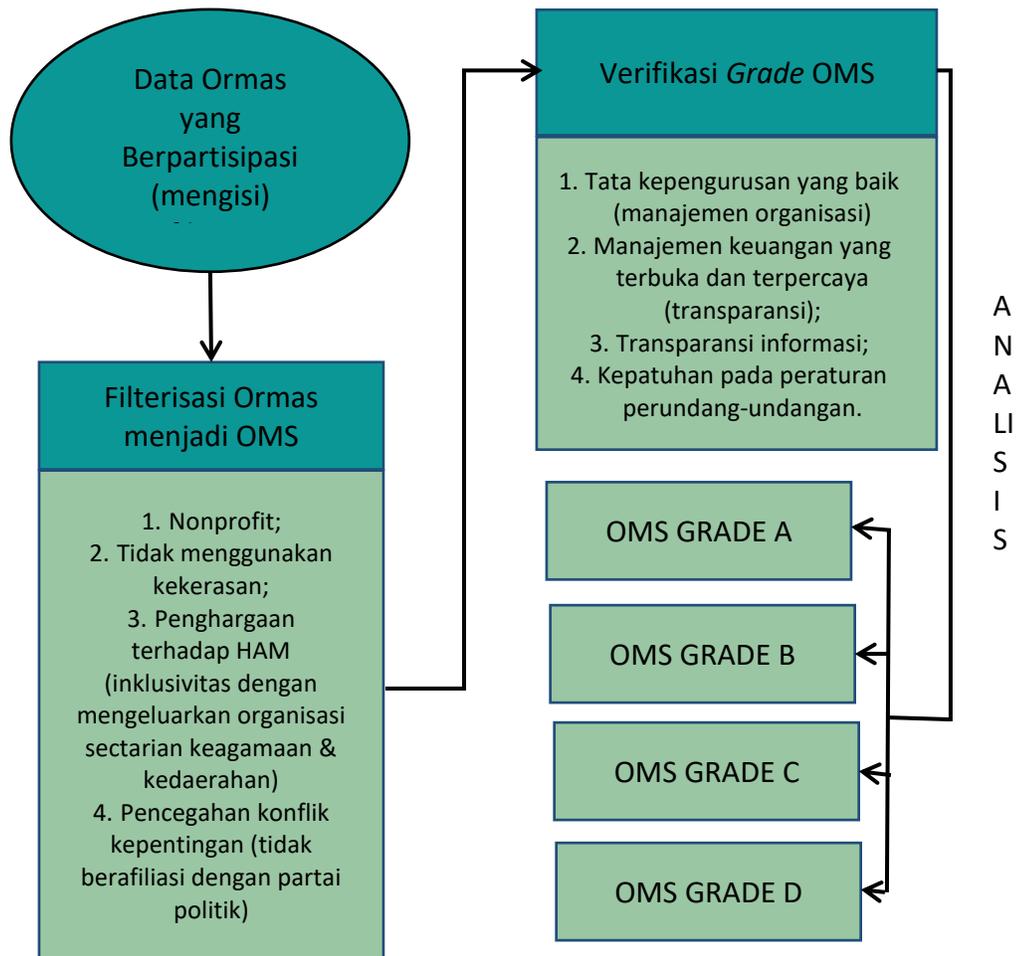
2.5 Kerangka Operasional Kategori LSM

Dalam konteks mendorong serta melahirkan LSM yang akuntabel dan berkelanjutan, penting untuk memastikan kebijakan negara yang memberi perhatian terhadap elemen penting demokrasi ini. Salah satunya melalui Dana Abadi OMS yang dirancang oleh Kementerian Bappenas. Pengklasifikasian OMS dengan merujuk standar akuntabilitas menjadi sebuah keniscayaan untuk melahirkan LSM yang profesional dan akuntabel.

Dalam mengkategorisasi LSM, proses verifikasi ini akan dilakukan melalui dua tahap. *Pertama*, proses pemisahan OMS dari ormas lainnya dengan indikator kunci yang meliputi: non-profit, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap HAM yang dalam operasionalnya merujuk pada inklusivitas organisasi (non sektarian, baik dalam keyakinan keagamaan maupun kedaerahan) maupun pencegahan konflik kepentingan yang diukur melalui keterlibatan dan afiliasi LSM dengan partai politik tertentu.

Kedua, proses verifikasi OMS untuk keperluan *grading* (kategorisasi) dengan merujuk pada tata kelola LSM yang baik (*good NGO governance*) dan standar minimal akuntabilitas LSM. Masing-masing dimensi maupun standar yang digunakan dalam verifikasi ini hanya dipilih yang relevan, yaitu 1 dimensi dari tata kelola LSM yang baik dan 3 dari standar minimal akuntabilitas LSM. Untuk selanjutnya penyebutan dimensi dan standar ini akan disebut sebagai rumpun, yaitu:

1. Tata kepengurusan yang baik (manajemen organisasi)
2. Manajemen keuangan yang terbuka dan terpercaya (transparansi)
3. Transparansi informasi
4. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan



Grafik 2. 1. Kerangka Konsep Verifikasi Data OMS

Adapun secara operasional keempat rumpun verifikasi data OMS tersebut disusun menjadi pertanyaan-pertanyaan inti untuk menggambarkan posisi lembaga serta untuk memudahkan proses pengklasifikasian (*grading*) OMS. Berikut keempat rumpun verifikasi data OMS beserta indikator pertanyaan yang disusun dan diajukan:

Tabel 2. 1. Empat Rumpun Verifikasi Data OMS dan Indikator Pertanyaan

Rumpun Verifikasi Data OMS	Indikator Pertanyaan
1. Tata kepengurusan yang baik (manajemen organisasi)	1.1 Memiliki struktur pengurus
	1.2 Memiliki Visi dan Misi
	1.3 Memiliki AD dan ART
	1.4 Memiliki program kerja
2. Manajemen keuangan yang terbuka dan terpercaya (transparansi)	2.1 Kepemilikan NPWP
	2.2 Kepemilikan rekening atas nama lembaga
	2.3 Pelaporan kewajiban pajak
	2.4 Audit kelembagaan
	2.5 SOP keuangan
	2.6 Sistem pencatatan keuangan
3. Transparansi informasi	3.1 Sumber pendanaan kegiatan organisasi
	3.2 Visibilitas organisasi yang meliputi: website, media sosial serta PIC organisasi
4. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan	4.1 Kelengkapan legalitas organisasi, yakni kepemilikan akta notaris, AHU dan SKT.

Selain keempat rumpun verifikasi data OMS, dalam proses verifikasi ini juga secara spesifik menanyakan soal fokus isu organisasi serta isu organisasi lainnya. Fokus isu yang ditanyakan kepada organisasi merujuk pada Pasal 12 draf rancangan Peraturan Presiden Dana Abadi Ormas yakni digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Ormas. Berikut daftar fokus isu yang dimaksud:

1. Pencapaian prioritas nasional dalam rencana pembangunan nasional;
2. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
3. Hak asasi manusia dan demokrasi;

4. Pelayanan publik;
5. Perlindungan lingkungan hidup dan aksi iklim (*climate action*);
6. Keberagaman, kebhinekaan, toleransi dan perdamaian;
7. Buruh dan tenaga kerja;
8. Kesehatan;
9. Pemberdayaan masyarakat, termasuk dan tidak terbatas pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat serta kelompok terpinggir dan rentan; dan
10. Perlindungan dan perluasan kesempatan bagi kelompok terpinggir dan rentan.

Jika dirinci berdasarkan aspek tata kelola organisasi yang baik dan standar minimal akuntabilitas LSM, maka yang harus terintegrasi dalam aktivitas OMS bisa dilihat dalam rincian berikut ini:

Tabel 2. 2. Indikator Standar Maksimal Grading berdasarkan Akuntabilitas dan Good NGO Governance

1. Kepemilikan kantor	19. Memiliki Rekening atas nama organisasi
2. <i>Board</i>	20. Tools keuangan
3. Pengurus tetap organisasi	21. Audit eksternal 2 tahun
4. Pengurus aktif	22. Audit internal
5. AD/ART	23. SOP keuangan
6. Visi, Misi	24. Laporan pajak
7. Struktur organisasi	25. Laporan keuangan
8. Isu utama organisasi	26. Renstra
9. Keahlian utama	27. SOP program
10. Non-partisan	28. Laporan tahunan
11. Mekanisme rapat	29. Anti <i>Fraud</i>
12. Program rutin	30. <i>Monitoring, Evaluation, and Learning</i> (MEL)
13. Mekanisme pengawasan	31. Mekanisme Aduan
14. AHU/SKT	32. Penerima manfaat
15. Kemitraan	33. <i>Multi sources mobilization</i>
16. Eksistensi organisasi di atas 5 tahun	34. Visibilitas (web, medsos, CP)
17. Kebijakan organisasi yang inklusif dan berprespektif HAM (perempuan, anak, gender, dan kelompok rentan lainnya)	✓ Website
18. Memiliki NPWP	✓ Kontak person
	✓ Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Youtube)

Ke 34 poin di atas merupakan standar pengelolaan organisasi yang baik (*good NGO governance*) dan idealnya seluruh organisasi (OMS) mengintegrasikan poin-poin tersebut dalam aktivitas keorganisasian. Poin-poin tersebut merupakan pengejawantahan dari tata kelola organisasi yang baik serta standar minimal akuntabilitas organisasi.

Namun, demikian dalam implementasi verifikasi data OMS tidak seluruh poin-poin tersebut ditanyakan kepada OMS sebab beberapa poin perlu verifikasi faktual dengan OMS secara langsung.

2.6 Pembatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan proses verifikasi, indikator ideal dari tata kelola OMS yang baik serta akuntabilitas organisasi tidak semuanya bisa dioperasionalkan dalam pertanyaan. Terutama soal *safeguarding* dan poin-poin penting yang memerlukan pembuktian dari organisasi. Namun demikian, dalam proses verifikasi ini diterapkan sebuah standar minimal tata kelola organisasi serta standar minimal akuntabilitas OMS. Peta daftar kluster minimal *good NGO governance* dan standar minimal akuntabilitas yang ditanyakan kepada organisasi adalah sebagai berikut:



Grafik 2. 2 Operasionalisasi Indikator Standar Akuntabilitas dan Good NGO Governance Menjadi Grade

2.7 Disclaimer

1. Laporan verifikasi ini tidak merepresentasikan keseluruhan OMS seluruh Indonesia, mengingat *raw data* dan *base line* data tidak distratifikasi secara proporsional melainkan hanya berdasarkan ketersediaan data base yang bisa dijangkau;
2. Tingkat partisipasi laporan verifikasi ini juga didasarkan pada kesediaan OMS merespons ajakan partisipasi secara suka rela.

BAGIAN 3

METODOLOGI



3.1 Metode Pengambilan *Raw Data* dan *Base Line Data*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui *review* dokumen, *study online*, dan *online survey*.

Penelitian dilakukan dengan 3 tahapan. *Pertama*, pengumpulan data melalui metode *review* dokumen dari lembaga-lembaga mitra Pokja serta *study online* dengan mencari dan mengumpulkan informasi dasar mengenai OMS di media *online* dan media sosial.

Kegiatan verifikasi data OMS ini menggunakan sampel (*raw*) data kurang lebih 6.298 data OMS di seluruh Indonesia. Data dihimpun dari mitra/jaringan dan atau anggota dari organisasi anggota Konsorsium Pokja Perpres Dana Abadi OMS, Konsil LSM, OBH, Jarak, IKO, IKA, Yayasan Penabulu, INFID, WALHI, Yayasan Tifa, Kemendagri, Madani, Mitra Jogja, Odesa+Lakoat, Kesbangpol Kota Jambi, Jaringan Maarif Institute, Madani to Remdec, Mitra OMS Papua, serta Kesbangpol baik di tingkat nasional, maupun daerah seperti: Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Kesbangpol Kalimantan Utara, Kesbangpol Provinsi Babel, Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Kesbangpol Kota Makassar, Kesbangpol Kota Semarang, Kesbangpol Kota Jambi, Kesbangpol Kabupaten Seruyan, Kesbangpol Bengkalis, serta *referral* data via enumerator saat verifikasi sedang berjalan.

Selain pengumpulan data melalui lembaga mitra, proses verifikasi juga dipublikasikan melalui website konsillsm.or.id, media sosial Konsil LSM.

Pada tahap awal, untuk menghasilkan *base line* data awal, dilakukan penyisiran *raw* data untuk mengeluarkan data-data yang tidak relevan dengan dua kategori:

- a. Data dobel
- b. Data OMS berbasis keagamaan (*Faith Base Organization*).

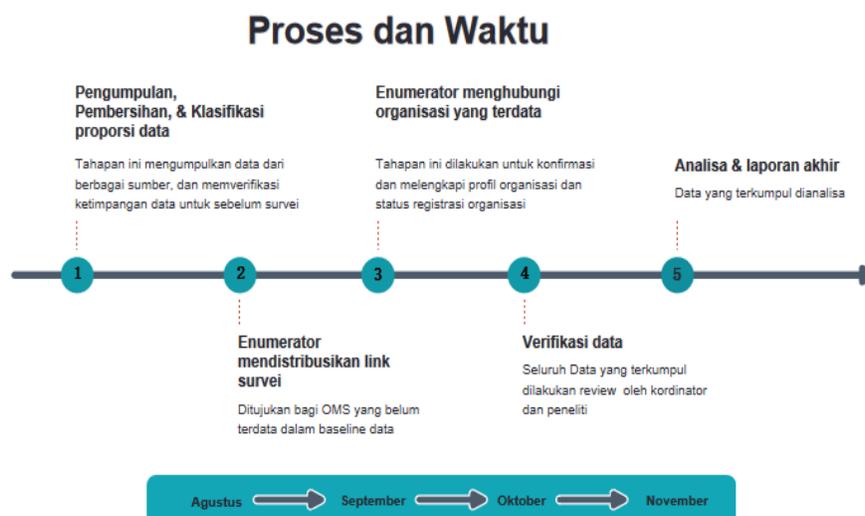
Selanjutnya data-data yang disisir dikategorisasi berdasarkan dua klaster besar, yakni lembaga dengan kelengkapan informasi mencapai 50-60% sebanyak 136 lembaga dan lembaga yang kelengkapannya hanya kontak (No. Telephone kantor, Nomor HP dan email).

3.2 Proses dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan November 2022. Tahapan proses penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

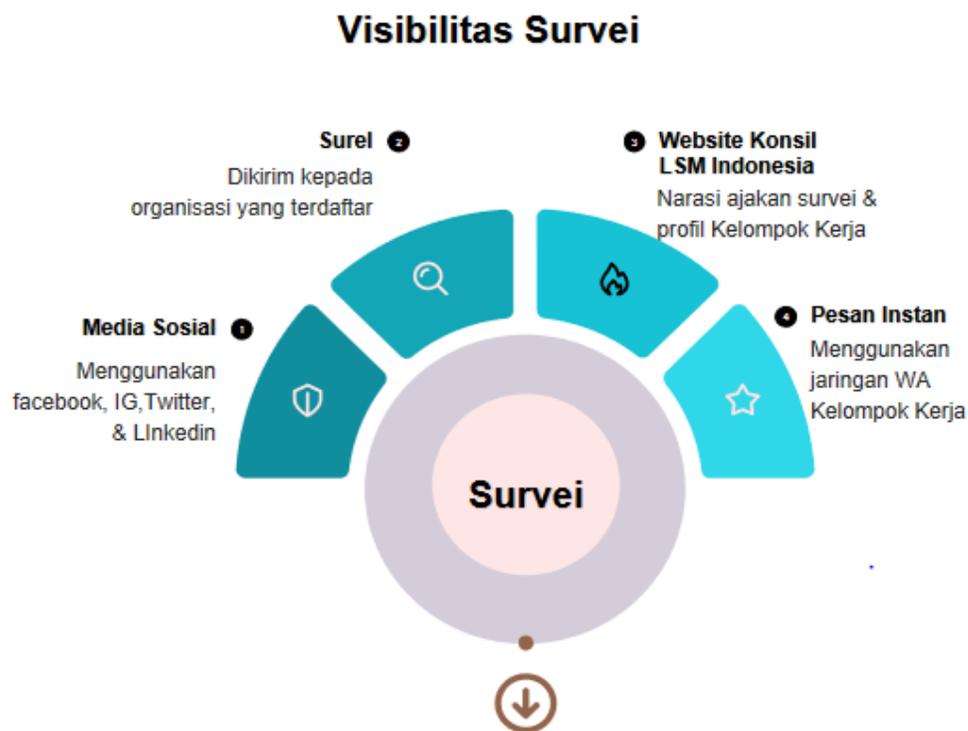
1. **Pengumpulan, pembersihan dan klasifikasi proporsi data.** Tahapan ini mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memverifikasi ketimpangan data sebelum disurvei;
2. **Enumerator mendistribusikan *link* survei.** Proses ini dilakukan enumerator dengan mendistribusikan link survei yang ditujukan pada OMS yang belum terdata dalam *baseline* data;
3. **Enumerator menghubungi organisasi yang terdata.** Tahapan ini dilakukan untuk mengkonfirmasi dan melengkapi profil organisasi dan status registrasi organisasi;
4. **Verifikasi data.** Dalam proses ini seluruh data yang terkumpul di-*review* oleh coordinator dan peneliti; dan
5. **Analisa dan Laporan Akhir.** Setelah data terkumpul, peneliti menganalisa dan menyarikannya dalam laporan.

Sebagai gambaran dari proses survei verifikasi data OMS ini dijelaskan pada gambar 3.1 di bawah ini.



Grafik 3. 1 Proses dan Waktu Penelitian

Selain mengumpulkan data melalui *review* dokumen dari mitra Pokja, proses verifikasi juga melalui proses akuntabilitas informasi, yakni menyebarkan informasi melalui media-media yang dimiliki oleh Konsil LSM, baik informasi melalui *website* maupun media sosial.



Grafik 3. 2 Visibilitas Informasi Verifikasi Data OMS

Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa seluruh rangkaian kegiatan dan informasi terkait verifikasi data OMS ini diinformasikan setransparan mungkin melalui media-media yang dikelola oleh Konsil LSM, baik melalui website, surel maupun media sosial.

Berdasarkan data pengunjung link survei, tercatat ada sebanyak 3.115 orang yang berkunjung dan 345 orang diantaranya melakukan klik *link* survei lebih dari satu kali.

BAGIAN 4

TEMUAN



4.1 Partisipasi Verifikasi Data OMS

Sejak verifikasi data OMS dilaksanakan pada Agustus 2022, ada empat tahap yang dilakukan untuk menghasilkan lembaga terverifikasi. Perjalanan verifikasi data OMS tersebut dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1 Matrik Perjalanan Data

Raw Data	Base line 1	Base line 2	Base Line 3		Base line 4
			Lembaga dengan kelengkapan informasi awal 50-60%	Data dengan kontak dan non kontak untuk dicari tim enumerator	Penjangkauan dengan rekomendasi <i>referral</i> via lembaga
6.462	4.347	2.837	136	2.715	2.922

Jumlah *raw-data* adalah sebanyak 6.462 lembaga. Data tersebut berasal dari mitra Pokja beserta data hasil temuan tim verifikasi dengan daftar sumber sebagai berikut: Konsil LSM Indonesia, OBH, Jarak, IKO, IKA, Yayasan Penabulu, INFID, WALHI, Yayasan TIFA, Kemendagri, Madani, Mitra Jogja, Odesa plus Lakoat, Kesbangpol Kota Jambi, Jaringan Maarif Institute, Madani to Remdec, Kesbangpol Kabupaten Seruyan, Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Kesbangpol Bengkalis, Mitra LSM di Papua, dan Kesbangpol Kalimantan Utara, serta *referral* via enumerator saat verifikasi sedang berjalan.

Data *base-line* 1 berjumlah 4.347 lembaga. Pada *raw-data*, ditemukan banyak data lembaga yang tercatat berulang (dobel) karena ada beberapa lembaga anggota Pokja Dana Abadi OMS memiliki mitra yang sama. Pada tahap ini, proses yang dilakukan adalah membersihkan data dengan cara menghapus lembaga-lembaga yang teridentifikasi dobel. Hasil *base-line* 1 ini disajikan saat rapat koordinasi dengan Pokja Dana Abadi OMS serta Bappenas di Bogor. Sebagai catatan, data *base-line* ini masih memasukkan lembaga seperti: Gapoktan, Ormas keagamaan, organisasi adat, dan organisasi kedaerahan.

Data *base-line* 2 berjumlah 2.837 lembaga. Pada tahap ini dilakukan penyisiran ulang dengan menghapus data dobel dan data ormas berbasis keagamaan, gapoktan, poktan, pok nelayan, organisasi adat, serta organisasi kedaerahan.

Data *base-line* 3, terdiri dari 2 kategori. **Pertama**, data dengan kelengkapan informasi 50-60% sebanyak 136 organisasi. Data ini diperoleh dari data hasil survei Konsil LSM dengan pertanyaan yang mirip dengan survei verifikasi data OMS. Kedua, gabungan data yang memiliki kontak dan non kontak sebanyak 2.715 organisasi. Apabila dirinci, organisasi dengan kategori memiliki kontak, yakni: memiliki nomor kontak pengurus, alamat kantor, alamat media sosial, dan email adalah sebanyak 1.935 lembaga. Sedangkan kategori non kontak atau kelengkapan informasi kontak minim sebanyak 780 lembaga.

Data *base-line* 4 berjumlah 2.922 lembaga. Data ini berasal dari data *base-line* 3 sebanyak 2.880 lembaga ditambah dengan data *referral* sebanyak 42 lembaga.

Dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh enumerator tidak semua responden memberikan respons positif. Gambaran tingkat partisipasi responden dijelaskan pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4. 2 Matrik Partisipasi OMS

Lembaga mengisi survei		Menolak	Menga-baikan	Tidak dapat dihubungi	Kontak tidak ditemukan / tidak eksis	Organisasi bubar/ tidak eksis	Jumlah
Via base line	Via referral						
615	42	810	229	450	707	69	2.922

Dalam proses verifikasi, untuk masifikasi penjangkauan dibuat kebijakan *referral* yakni meminta rekomendasi dari lembaga yang pernah dihubungi untuk merekomendasikan lembaga di daerah. Dari proses ini terjaring sekitar 207 lembaga. Dari 207 lembaga *referral* tersebut yang terkonfirmasi mengisi sebanyak 42 lembaga.

Adapun sebaran tingkat partisipasi respons berdasarkan provinsi dijelaskan pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4. 3 Proses Partisipasi Verifikasi Data OMS per Provinsi

No	Provinsi	Konfirmasi Mengisi		Menolak	Menggabaikan	Tidak Dapat Dihubungi	Kontak Tidak Ditemukan	Organisasi Bubar / Tidak Eksis	Jumlah
		Data Base Line	Referal						
1	Aceh	20		21		32	33		106
2	Sumatera utara	54	4	45	6	26	16	2	153
3	Sumatera Barat	9		19	1	10	3		42
4	Sumatera Selatan	7		36	6	16	44	7	116
5	Riau	7		12	12	3		5	39
6	Kepulauan Riau	6	2	5	3		2		18
7	Jambi	7		40	4	12	24		87
8	Bengkulu	10		5		5	11		31
9	Lampung	12	2	19	7	7		2	49
10	Babel	8		2	7	4	22		43
11	Banten	23	3	29	10	16	16	8	105
12	DKI Jakarta	67	5	89	11	22	65	11	270
13	Jawa Barat	68	14	44	50	35	34	9	254
14	Jawa Tengah	46	2	2	2	38	16	3	109
15	DI Yogyakarta	6		60	12	13	12		103
16	Jawa Timur	29		117	26	17	28		217
17	Kalimantan Barat	27		29	3	40	35	4	138
18	Kalimantan Tengah	5		12	6	10	12		45
19	Bali	15		8		10	2		35
20	NTB	24		15	6	15	61		121
21	NTT	22		22	4	31	7	3	89
22	Kalimantan Selatan	6		10		5	4		25
23	Kalimantan Utara	8	1	1	7	7		4	28
24	Kalimantan Timur	6		23	2	1	11	2	45
25	Sulawesi Selatan	49	7	56	22	34	84	4	256
26	Sulawesi Tenggara	9		24	3	4	33		73
27	Sulawesi Barat	4		4		3	10	2	23

28	Sulawesi Tengah	18		10	4	9	8	3	52
29	Sulawesi Utara	6		5	2	3	5		21
30	Gorontalo	6	1	6	2	2			17
31	Maluku Utara	6		11		4	14		35
32	Maluku	9		3	3	1	50		66
33	Papua Barat	6		10		7	19		42
34	Papua	10	1	15	8	8	27		69
Jumlah		615	42	809	229	450	708	69	2.922

Berdasarkan tabel di atas, terdapat lima kategori respons OMS. Adapun arti untuk masing-masing respon adalah sebagai berikut:

1. **Menolak;** berarti enumerator telah melakukan *reminder* sebanyak 3x kepada lembaga bersangkutan dengan interval menghubungi 3-5 hari.
2. **Mengabaikan;** berarti responden (lembaga) telah menerima informasi dan menyatakan akan mengisi, tetapi tetap tidak mengisi meskipun sudah di-*reminder* sebanyak 3X.
3. **Tidak dapat dihubungi;** berarti kontak organisasi yang tersedia tidak valid (tidak aktif, bukan orang/organisasi yang dituju) dan melalui *tracking* secara daring enumerator tetap tidak mendapatkan kontak alternatif lain.
4. **Kontak tidak ditemukan;** berarti organisasi yang tidak dilengkapi dengan kontak baik Whastapp, email, ataupun akun sosial media yang aktif.
5. **Organisasi bubar atau tidak eksis;** berarti lembaga yang dihubungi oleh enumerator memberikan konfirmasi bahwa organisasinya sudah tidak aktif atau tidak eksis lagi.

Upaya yang dilakukan tim peneliti untuk mendorong keterlibatan OMS dalam verifikasi data OMS adalah melalui publikasi informasi verifikasi data OMS di website dan media sosial Konsil LSM serta mitra Pokja Dana Abadi OMS yang turut mempublikasikan proses verifikasi data OMS. Data aktual partisipasi responden dalam survei ini adalah sebagai berikut:

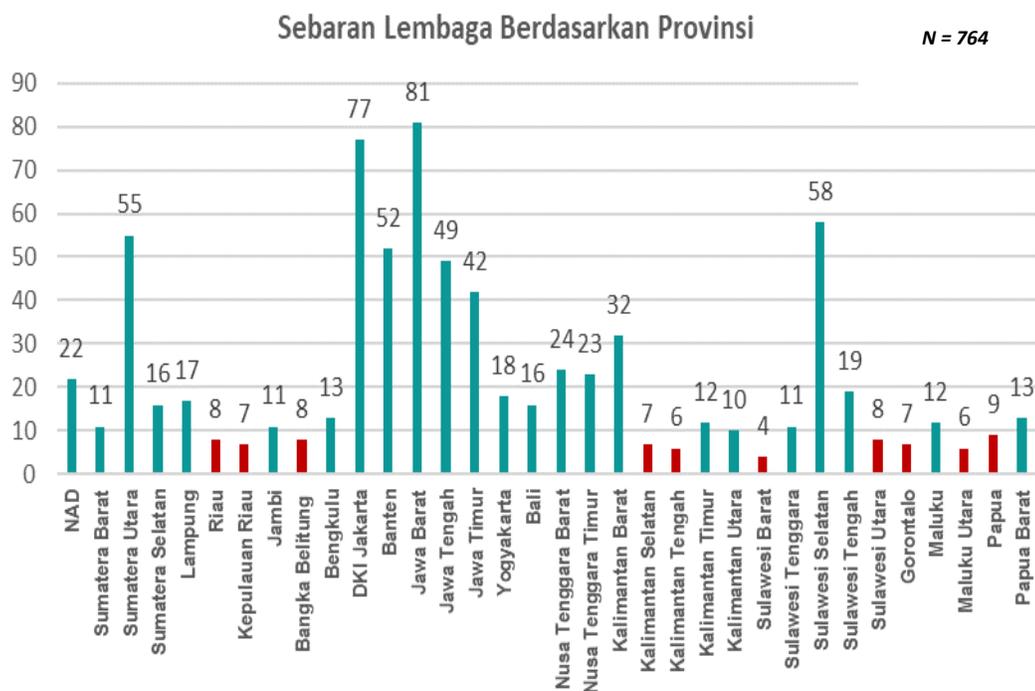
Tabel 4.4 Matrik Journey Data OMS Yang Mengikuti Verifikasi Aktual

Lembaga mengisi Google Form	Data aktual/unik Google Form (setelah dikurangi Lembaga yang mengisi dua kali/dobel)		
	Lembaga yang Konfirmasi telah mengisi (lembaga yang masuk <i>base line</i>)	Referral (kontak <i>peer to peer</i> , dimana enumerator dibantu oleh organisasi responden untuk menyebarkan undangan survey verifikasi database Ormas kepada jaringannya)	Lembaga yang mengisi Google Form tidak melalui enumerator maupun referral.
806	615	42	107

Selama proses verifikasi, jumlah partisipasi organisasi mengisi google form berjumlah 806. Setelah melalui tahapan pengecekan, terdapat lembaga yang mengisi lebih dari satu kali bahkan 3 kali. Setelah dibersihkan data aktual/unik partisipan berjumlah 764 lembaga.

764 lembaga yang berpartisipasi dalam survei ini berasal dari tiga unsur, yakni: lembaga yang terdata sebelumnya (lembaga-lembaga yang masuk *base-line*) sebanyak 615 lembaga, lembaga hasil rekomendasi lembaga yang mengikuti survei (*referral*) sebanyak 42 lembaga, dan lembaga yang mengisi tanpa melalui proses dihubungi enumerator ataupun melalui *referral* lembaga lainnya sebanyak 107 lembaga.

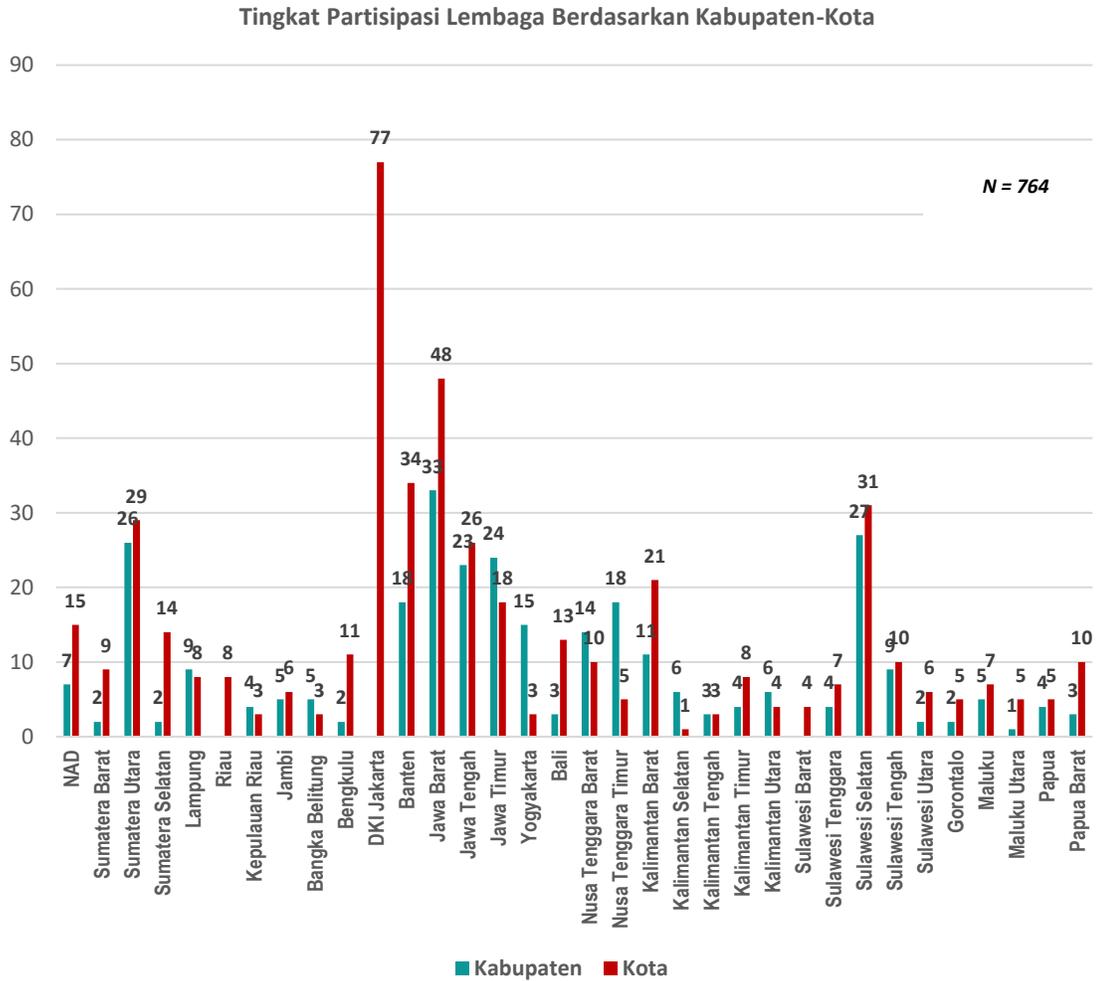
Berikut sebaran 764 lembaga yang berpartisipasi dalam survei verifikasi data OMS berdasarkan provinsi:



Grafik 4. 1 Sebaran Partisipasi Lembaga Berdasarkan Provinsi

Dari 764 lembaga yang mengisi survei verifikasi data, wilayah Jawa Barat merupakan daerah dengan partisipasi paling tinggi yakni mencapai 81 lembaga. Di urutan ke dua adalah DKI Jakarta dengan jumlah partisipasi sebanyak 77 lembaga, kemudian Sulawesi Selatan sebanyak 58 lembaga, Sumatera Utara sebanyak 55 lembaga dan Banten sebanyak 52 lembaga. Sedangkan partisipasi paling minim berasal dari Provinsi Sulawesi Barat yakni sebanyak 4 lembaga, Kalimantan Tengah dan Maluku Utara 6 lembaga, serta Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan dan Gorontalo masing-masing 7 lembaga.

Berikut adalah gambaran data partisipasi OMS dari total partisipan yang mencapai 764 berdasarkan kabupaten/kota seperti terlihat dalam grafik berikut ini:

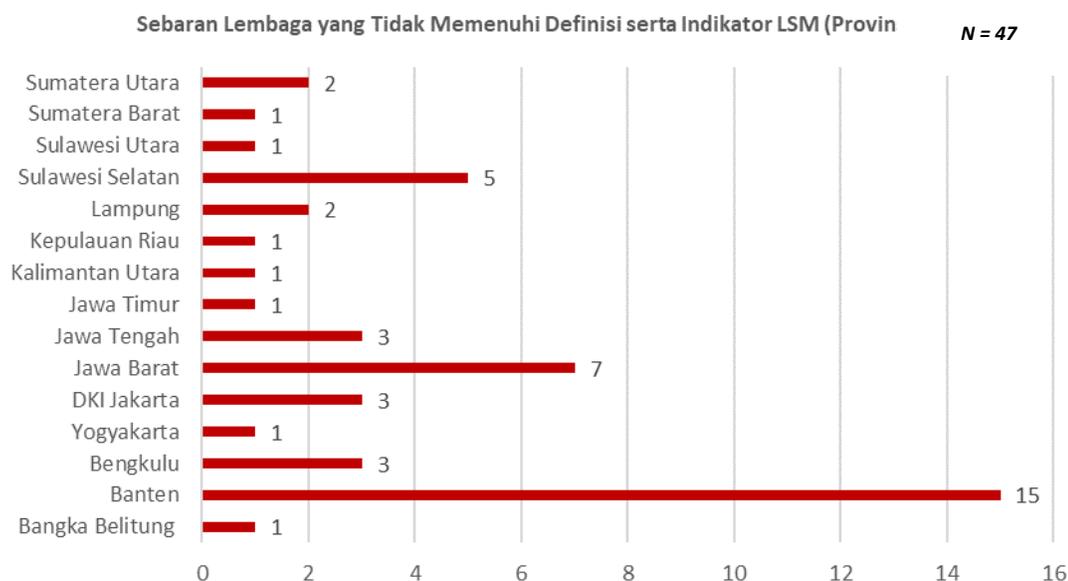


Grafik 4. 2 Partisipasi Lembaga Berdasarkan Kabupaten-Kota

Berdasarkan wilayah kabupaten dan Kota, dari 764 lembaga yang berpartisipasi, lembaga yang berdomisili di kabupaten mencapai 297 lembaga dan di Kota sebanyak 467 lembaga. Wilayah sebaran dengan jumlah lembaga yang berdomisili di Kota terbanyak berada di DKI Jakarta, sedangkan lembaga yang berdomisili di kabupaten terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat yakni sebanyak 33 kabupaten.

4.2 Lembaga Non-OMS

Merujuk definisi serta indikator LSM dalam kerangka konsep, dari 764 lembaga yang berpartisipasi terdapat 49 lembaga yang tidak memenuhi unsur dari definisi serta indikator LSM. Berikut sebaran organisasi non-OMS berdasarkan provinsi:



Grafik 4. 3 Sebaran Lembaga Non-OMS (Provinsi)

Dari jumlah organisasi yang berpartisipasi mengisi survei data OMS, ditemukan sebanyak 49 lembaga yang dikategorikan non OMS/LSM. Proporsi lembaga yang tidak masuk kategori definisi LSM terbanyak berasal dari Provinsi Banten sebanyak 15 lembaga, posisi kedua Jawa Tengah sebanyak 7 lembaga, dan Sulawesi Selatan sebanyak 5 lembaga. Lembaga-lembaga tersebut tidak masuk kategori LSM karena tidak memenuhi unsur-unsur LSM, seperti: non-sektarian, non-profit, lembaga pendidikan, menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, dan berafiliasi dengan partai politik. Temuan lembaga dengan kategori non LSM dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Non Sektarian (Ormas keagamaan)**, seperti: Aisyiyah, Nasyiyatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Wanita Syarikat Islam, Himpunan Mahasiswa Islam, Fatayat NU);
2. **Non sektarian (Ormas kedaerahan)**, seperti: Komunitas Aing Sunda Banten, Paguyuban Putra Daerah (PAPDA) Kota Semarang, Perkumpulan Melayu Minang Batam;

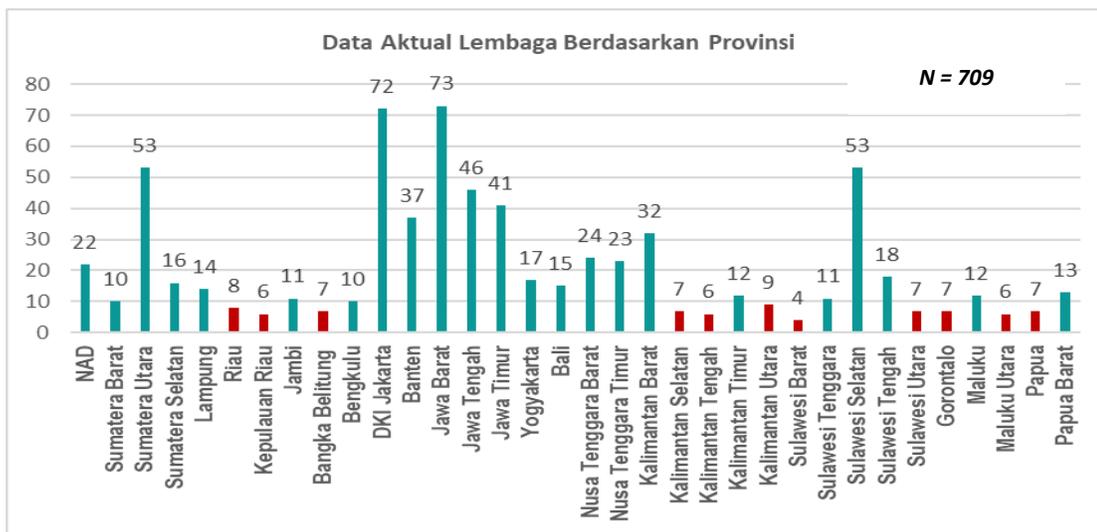
3. **Lembaga profit**, seperti: Kamar Dagang Induk Usaha Kecil Menengah/KADIN UMKM, PT. Peduli Rakyat Indonesia;
4. **Kelompok dengan indikasi menggunakan kekerasan dalam aktivitas**, seperti: PD. Pemuda Panca Marga, Pemersatu Satria Banten, Perkumpulan Jawara banten, Santri dan Kaum Intelektual;
5. **Lembaga Pendidikan**, seperti: Pondok Pesantren Inklusif Tri Bhakti Al-Qudwah, Lembaga Pendidikan Islam;
6. **Kelompok Tani**, seperti: Forum Kelompok Tani Holopis Kuntul Baris, Toga Horti Bibase;
7. **Kelompok baca masyarakat**, seperti: Rumah Baca Anak Desa, Taman Bacaan Masyarakat Batambat Satangkalan.

Selain itu juga ditemukan 6 lembaga yang mengisi atau menyatakan “YA” berafiliasi dengan partai politik. Lembaga tersebut berasal dari DKI Jakarta ada 2 lembaga, Bali, Jawa Barat, Lampung, dan Sulawesi Tengah masing-masing 1 lembaga.

Daftar lembaga dengan kategori sebagai lembaga non LSM berdasar pada definisi serta indikator LSM dan lembaga yang menyatakan berafiliasi dengan partai politik dapat lihat pada **Lampiran 1**.

Jadi dari 764 lembaga, ditemukan 49 lembaga yang tidak masuk kategori LSM dan 6 lembaga lainnya menyatakan berafiliasi dengan partai politik. Maka jumlah lembaga aktual setelah dikurangi lembaga bukan LSM dan lembaga yang berafiliasi dengan partai politik adalah 709 lembaga.

Berikut sebaran 709 lembaga aktual berdasarkan provinsi:



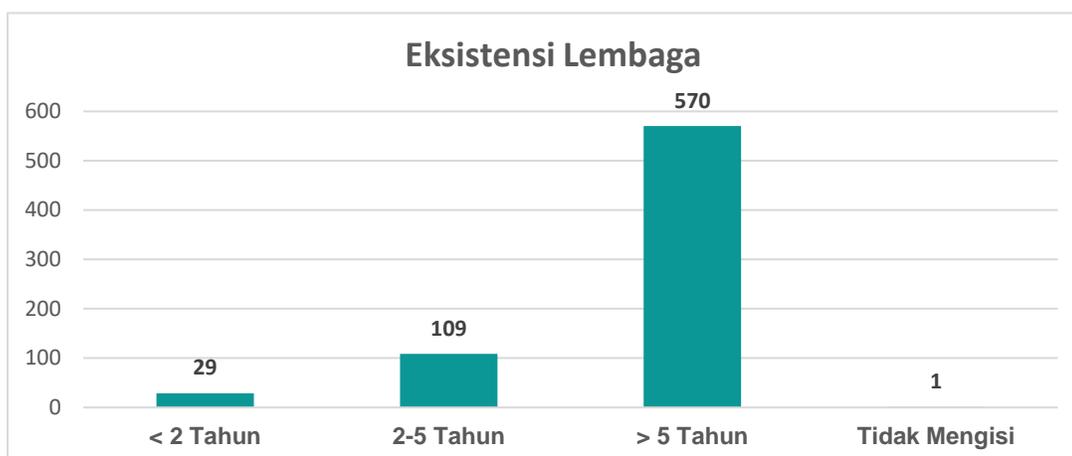
Grafik 4. 4 Sebaran Data Aktual Lembaga Berdasarkan Provinsi

Dari grafik di atas terlihat bahwa provinsi Jawa Barat merupakan penyumbang partisipan terbanyak dalam verifikasi data OMS sebanyak 73 lembaga, DKI Jakarta sebanyak 72 lembaga, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara masing-masing 53 lembaga, Jawa Tengah sebanyak 46 lembaga dan Jawa Timur sebanyak 41 lembaga.

4.3 Eksistensi Organisasi

Salah satu indikator penting untuk memilah grade organisasi/OMS adalah soal eksistensi lembaga. Syarat eksistensi ini mengacu pada beberapa indikator yakni, *Pertama*, lamanya eksistensi lembaga berdiri menunjukkan ketahanan organisasi. *Kedua*, eksistensi juga terkait dengan pengalaman organisasi mengelola sebuah *project* atau program tertentu. *Ketiga*, eksistensi merupakan salah satu indikator minimal sebuah lembaga dapat mengajukan program swakelola pemerintah yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 dimana salah satu syarat pengajuan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menyantumkan bukti lapor pajak 2 tahun terakhir.

Kategori usia organisasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu organisasi yang eksis di bawah 2 (dua) tahun, antara 2-5 tahun, dan di atas 5 tahun. Berikut grafik jumlah organisasi berdasarkan eksistensi (usia organisasi).



Grafik 4.5. Eksistensi Lembaga Berdasarkan Usia

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah lembaga yang eksis lebih dari 5 tahun lebih banyak dari lembaga yang eksistensi di bawahnya, yaitu sebanyak 570 lembaga (80%). Kemudian ada 1 lembaga yang tidak mengisi/menjawab kapan organisasi/lembaganya didirikan.

4.4 Manajemen Organisasi

Selain menggali aspek administratif, survei ini juga menggali informasi terkait dengan manajemen organisasi. Rumpun ini digali dengan enam pertanyaan inti, yakni: visi dan misi, AD/ART, struktur pengurus baku dan program kerja. Berikut matrik kunci dari rumpun manajemen organisasi.

Tabel 4. 5 Pertanyaan Manajemen Organisasi

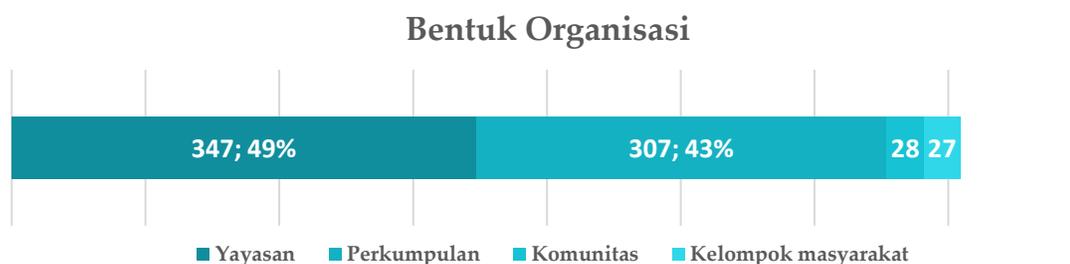
No	Pertanyaan	Ya (%)	Tidak	"N"
1	Memiliki Visi	646 (91%)	63	709
2	Memiliki Misi	640 (90%)	69	709
3	Kepemilikan AD	685 (97%)	24	709
4	Kepemilikan ART	665 (94%)	44	709
5	Struktur Pengurus Baku	670 (94%)	39	709
6	Program Kerja	694 (98%)	15	709

Berdasarkan data pada tabel di atas, mayoritas organisasi memiliki visi, misi, AD/ART, struktur pengurus, dan program kerja. Jawaban responden $\geq 90\%$, ada kemungkinan lembaga yang memiliki 6 indikator manajemen organisasi tersebut adalah sebanyak 90%.

4.5 Legalitas Organisasi

Komponen lain yang menjadi indikator *grading* adalah legalitas organisasi/lembaga. Komponen ini meliputi: Bentuk lembaga/organisasi, kepemilikan SKT, dan pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan HAM.

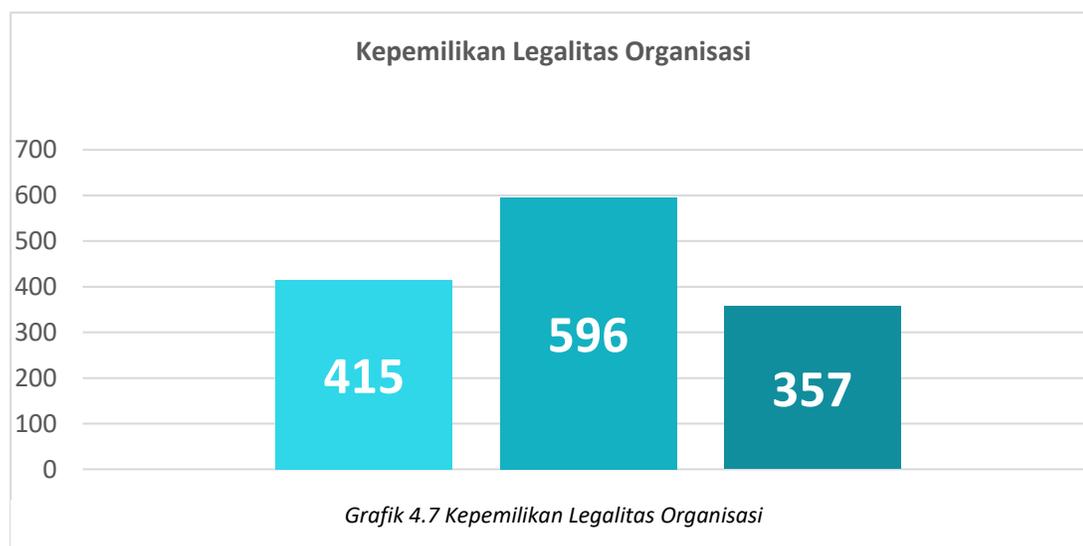
Bentuk organisasi terkait dengan penelitian ini dibagi menjadi empat bagian, yakni: Yayasan, Perkumpulan, Komunitas, dan Kelompok Masyarakat. Berikut grafik jumlah organisasi berdasarkan bentuk legalitas organisasi yang mengikuti verifikasi data OMS.



Grafik 4. 6 Bentuk Organisasi

Berdasarkan data di atas, dua bentuk organisasi/lembaga yang paling banyak adalah yayasan sebanyak 347 organisasi (49%) dan perkumpulan sebanyak 307 lembaga/organisasi (43%).

Dari segi legalitas, komponen hukum yang digunakan untuk memverifikasi organisasi yakni pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan HAM RI serta Surat Keterangan

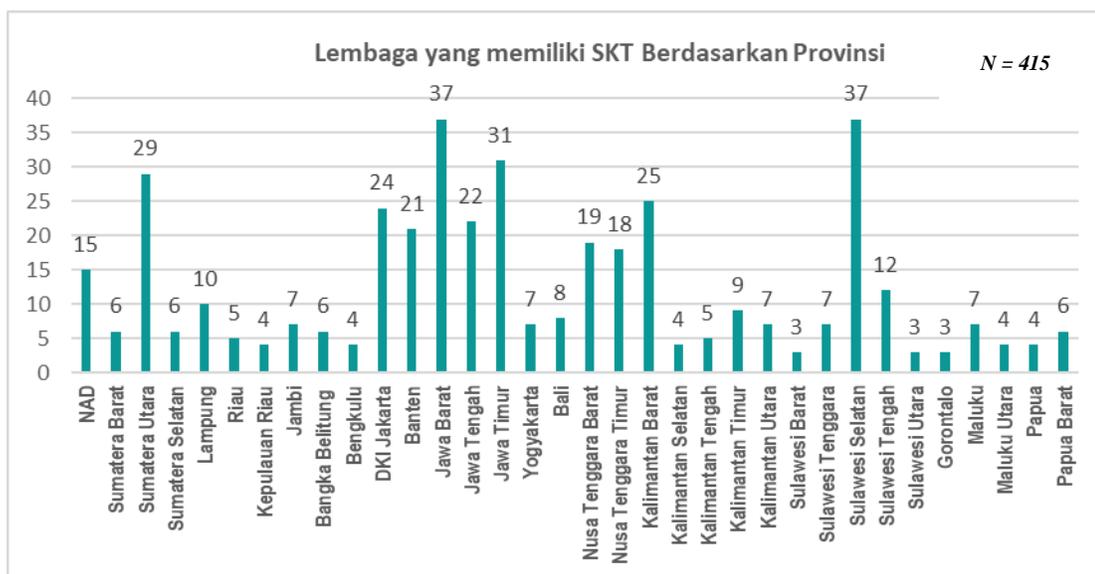


Grafik 4.7 Kepemilikan Legalitas Organisasi

Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri RI, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Berikut data kepemilikan legalitas lembaga/organisasi yang mengisi survei verifikasi OMS.

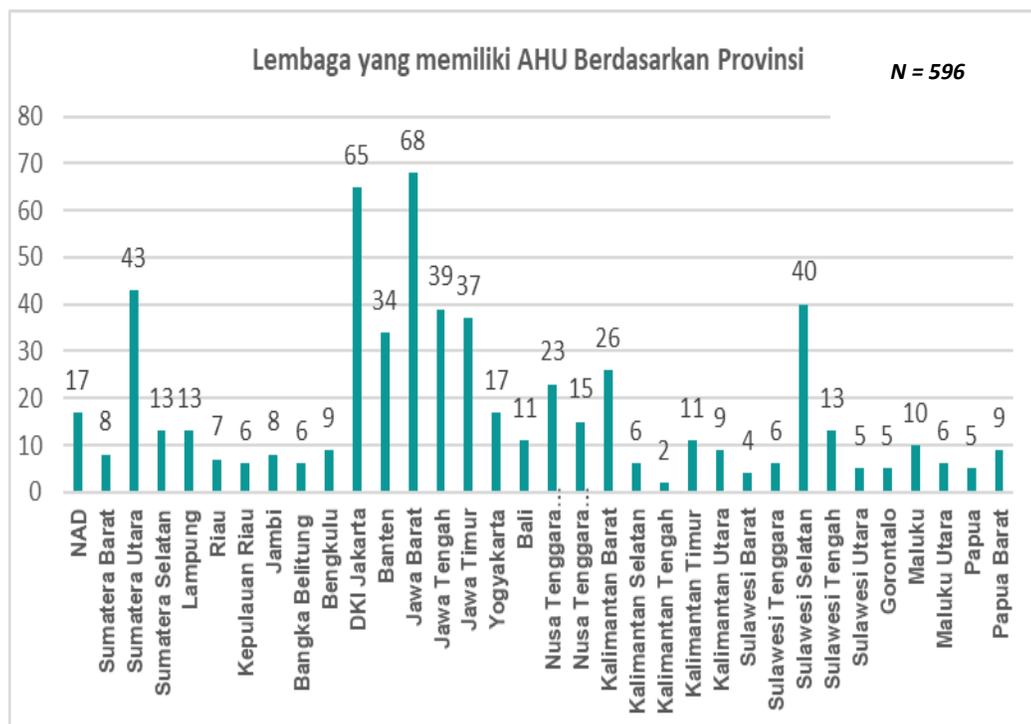
Dari 709 lembaga yang berpartisipasi, sebanyak 415 lembaga menyatakan hanya memiliki SKT saja, sebanyak 596 lembaga hanya memiliki AHU saja dan sebanyak 357 lembaga memiliki SKT dan AHU.

Berikut sebaran lembaga yang memiliki SKT, AHU serta SKT dan AHU berdasarkan provinsi:



Grafik 4.8 Lembaga yang Memiliki SKT Berdasarkan Provinsi

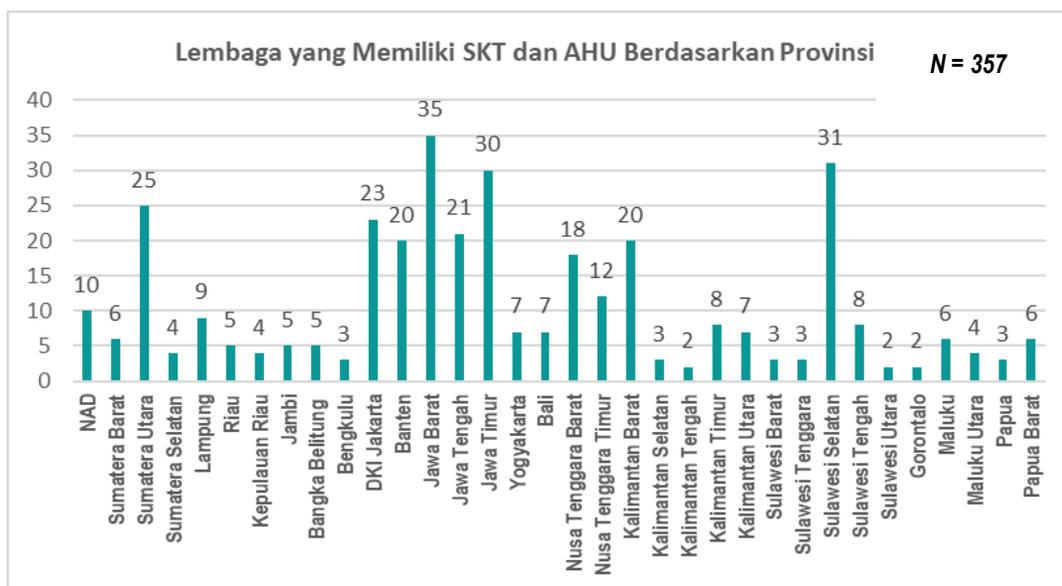
Berdasarkan sebaran provinsi, dari 415 lembaga yang memiliki SKT terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan yakni masing-masing sebanyak 37 lembaga, Jawa Timur sebanyak 31 lembaga, Sumatera Utara sebanyak 29 lembaga dan Kalimantan Barat sebanyak 25 lembaga.



Grafik 4.9 Lembaga yang Memiliki AHU Berdasarkan Provinsi

Berdasarkan sebaran provinsi, dari total 596 lembaga yang memiliki AHU terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 68 lembaga, DKI Jakarta sebanyak 65 lembaga, Sulawesi Selatan sebanyak 40 lembaga, dan Jawa Tengah sebanyak 39 lembaga.

Lembaga yang memiliki SKT dan AHU terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 35 lembaga, selanjutnya Sulawesi Selatan sebanyak 31 lembaga, dan Jawa Timur sebanyak 30 lembaga. Sedangkan wilayah dengan kepemilikan SKT dan AHU terendah berada di Provinsi Gorontalo, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara yakni sebanyak masing-masing 2 lembaga.



Grafik 4. 10 Lembaga yang Memiliki SKT dan AHU

Namun demikian, dalam lembaran survei ditemukan lembaga yang tidak mencantumkan/menuliskan, baik SKT maupun AHU karena keterkaitan dengan lembaga yang terpusat, seperti PKBI, Jaringan Indonesia Positif (JIP) dan organisasi lainnya yang memiliki kepengurusan dari tingkat pusat sampai kabupaten-kota lainnya. Beberapa lembaga tersebut tidak mengisi kolom AHU sebab masih terkait dengan AHU di tingkat pusat.

Dari 357 lembaga yang menyatakan memiliki SKT dan AHU, terdapat 11 lembaga yang tidak bisa menunjukkan/menuliskan nomor AHU. Keterangan yang disampaikan oleh lembaga tersebut adalah sedang dalam proses, ditunda, dan menunggu verifikasi. Selain itu ada juga lembaga yang menuliskan pengesahan dari pengadilan negeri kabupaten-kota.

4.6 Akuntabilitas Keuangan (Transparansi)

Salah satu poin penting yang diharapkan dimiliki oleh OMS adalah soal standar akuntabilitas keuangan. Dalam konteks itu, survei verifikasi data OMS ini pun menyertakan beberapa pertanyaan kunci untuk menggali informasi terkait

akuntabilitas keuangan, khususnya menggali soal: Kepemilikan NPWP, Rekening bank atas nama organisasi, laporan pajak, sistem Pencatatan keuangan, audit kelembagaan, dan SOP keuangan.

Tabel 4.6. Akuntabilitas Keuangan

No	List Pernyataan	Ya (%)	Tidak	Tidak Jawab/Isi
1	Kepemilikan NPWP	661 (93%)	48	-
2	Kepemilikan Rekening Bank a.n. organisasi	632 (89%)	74	3
3	Laporan Pajak	507 (72%)	202	
4	Kepemilikan Sistem Pencatatan Keuangan	582 (82%)	110	17
5	Audit Kelembagaan	311 (44%)	396	-
6	SOP Keuangan	592 (83%)	97	20

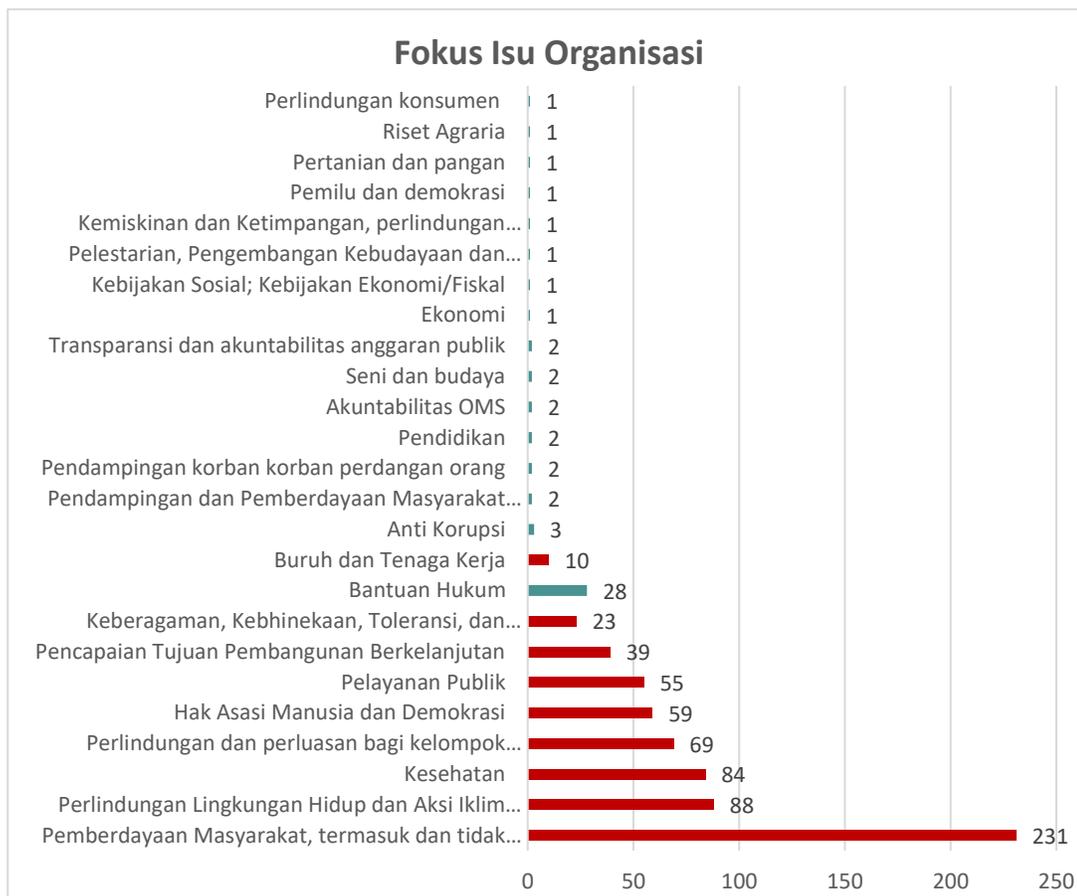
Bentuk tertinggi akuntabilitas keuangan atau mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya (dana) yang diperoleh dan dipercayakan kepadanya adalah melakukan audit keuangan lembaga dan lapor pajak. Dari 709 lembaga yang berpartisipasi dalam survei ini sebanyak 44% lembaga yang melakukan audit kelembagaan dan 72% yang melakukan lapor pajak. Dua indikator akuntabilitas keuangan tersebut berkecenderungan mencirikan bahwa lembaga tersebut dalam keadaan *finansial resilience*.

4.7 Isu dan Kompetensi Organisasi

Komponen penting dalam proses verifikasi ini adalah pengelompokan organisasi berdasarkan isu. Isu yang ditanyakan kepada responden mengacu pada draf isu utama yang dimuat dalam draf Perpres Dana Abadi OMS, meliputi:

1. Hak Asasi Manusia dan demokrasi;
2. Pelayanan publik;
3. Perlindungan lingkungan hidup dan aksi iklim (*climate action*);
4. Keberagaman, kebhinekaan, toleransi, dan perdamaian;
5. Buruh dan tenaga kerja;
6. Kesehatan;
7. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
8. Pemberdayaan masyarakat, termasuk dan tidak terbatas pada perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; dan
9. Perlindungan dan perluasan bagi kelompok terpinggir dan rentan.

Selain isu utama yang wajib dipilih oleh responden (lembaga), terdapat kolom lainnya yang bisa diisi oleh lembaga/organisasi jika pengelompokkan isu utama tidak menggambarkan kegiatan lembaga/organisasi. Berikut rekap fokus isu organisasi yang mengikuti verifikasi data OMS:



Grafik 2.11 Fokus Isu Organisasi

Dari grafik di atas terlihat bahwa fokus isu utama seperti yang tertuliskan dalam draf Perpres Dana Abadi Ormas yang paling banyak digeluti oleh lembaga (responden) adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat, termasuk dan tidak terbatas pada perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebanyak 231 lembaga/organisasi;
2. Perlindungan lingkungan hidup dan aksi iklim (*climate action*) sebanyak 88 lembaga/organisasi;
3. Kesehatan sebanyak 84 lembaga/organisasi;

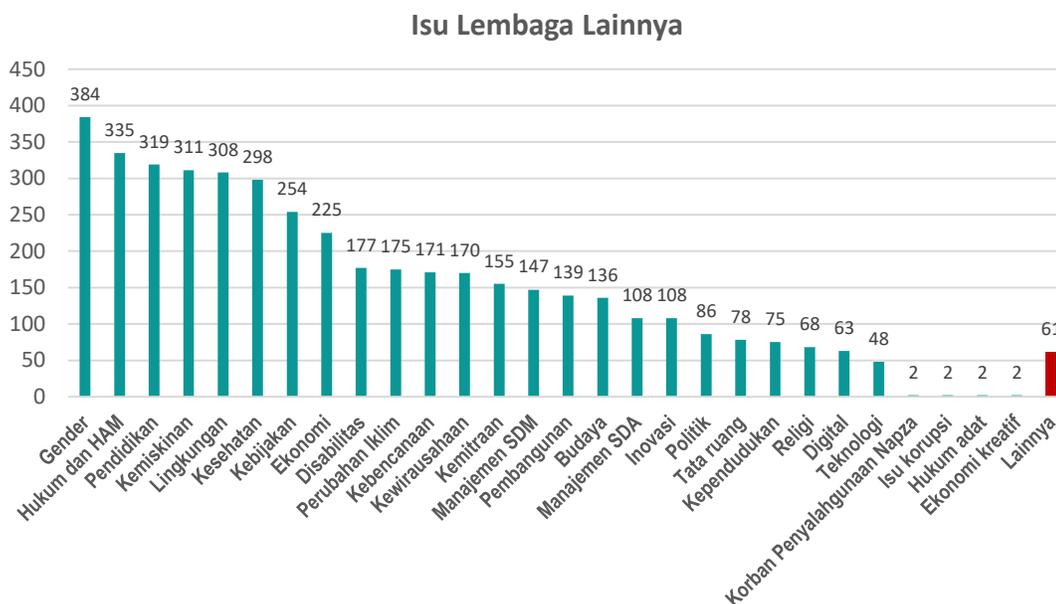
4. Perlindungan dan perluasan bagi kelompok terpinggir dan rentan sebanyak 69 lembaga/organisasi;
5. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi sebanyak 59 lembaga/organisasi;
6. Pelayanan publik sebanyak 55 lembaga/organisasi;
7. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebanyak 39 lembaga/organisasi;
8. Keberagaman, kebhinekaan, toleransi, dan perdamaian sebanyak 23 lembaga/organisasi;
9. Buruh dan tenaga kerja, sebanyak 10 lembaga/organisasi..

Selain sembilan (9) fokus isu tersebut, responden juga mengisi fokus isu lainnya seperti:

10. Bantuan hukum sebanyak 27 lembaga/organisasi;
11. Anti korupsi sebanyak 3 organisasi;
12. Akuntabilitas OMS sebanyak 2 organisasi
13. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan 2 organisasi
14. Pendampingan korban perdagangan orang sebanyak 2 organisasi
15. Pendidikan 2 organisasi
16. Seni dan kebudayaan sebanyak 2 organisasi
17. Transparansi dan akuntabilitas anggaran publik sebanyak 2 organisasi
18. Lainnya, ada sepuluh organisasi dengan 10 fokus isu yang berbeda, seperti: Pemilu dan demokrasi, pertanian dan pangan, perlindungan konsumen, pelestarian, pengembangan kebudayaan dan lingkungan, kemiskinan dan ketimpangan, kebijakan ekonomi fiskal, riset agrarian dan lainnya.

Selain menanyakan isu utama organisasi, dalam survei pun responden diminta untuk menjawab isu lainnya yang menjadi perhatian organisasi. Berikut gambaran isu yang juga menjadi *concern* lembaga/organisasi yang mengikuti verifikasi data OMS.

Terdapat 89 isu lain yang menjadi perhatian Lembaga/organisasi yang mengikuti proses verifikasi data OMS. Berikut kategori isu lainnya berdasar pilihan responden:

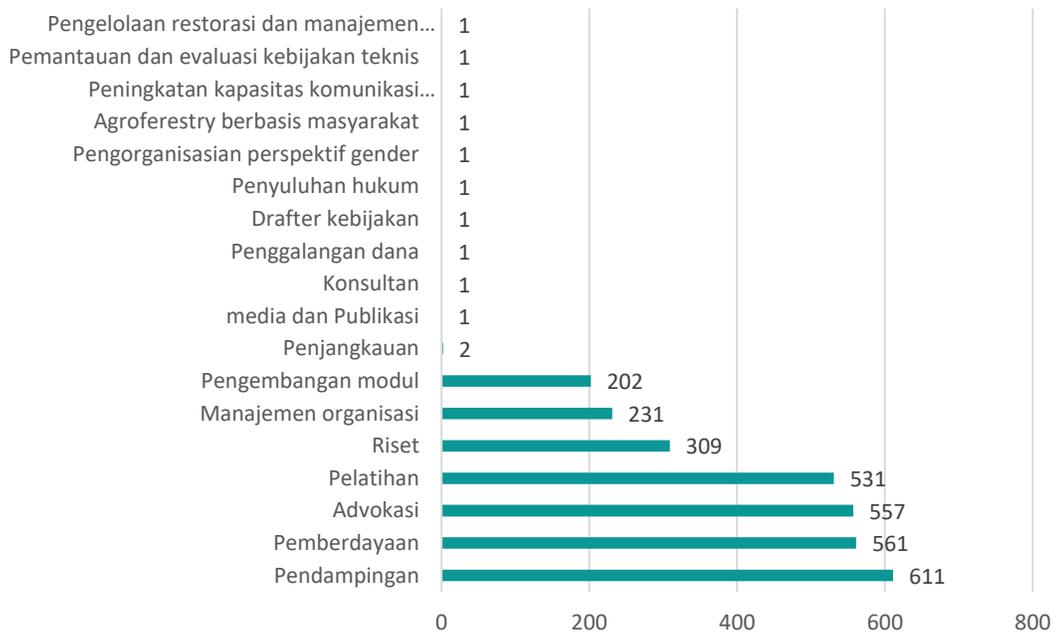


Grafik 4.12 Isu Lembaga Lainnya

Data di atas merupakan 29 isu utama dari 89 isu lainnya yang menjadi perhatian responden. Lima isu yang menjadi fokus terbesar responden adalah isu gender sebanyak 384 lembaga, isu hukum dan HAM sebanyak 335 lembaga, isu Pendidikan sebanyak 319 lembaga, isu kemiskinan sebanyak 311 lembaga, dan isu lingkungan sebanyak 308.

Selain fokus isu dan isu lainnya, dalam survei verifikasi data OMS ini juga digali soal kompetensi organisasi. Berikut grafik jumlah komponen kompetensi pilihan dari organisasi.

Kompetensi Lembaga



Grafik 4.13 Kompetensi Lembaga

Kompetensi lembaga yang paling banyak dikuasai oleh organisasi responden adalah pendampingan yakni sebanyak 611 organisasi, pemberdayaan sebanyak 561 organisasi, advokasi sebanyak 557 organisasi, pelatihan sebanyak 531 organisasi, riset sebanyak 309 organisasi, manajemen organisasi sebanyak 231 organisasi, pengembangan modul sebanyak 202 organisasi. Selain itu ada kompetensi unik lainnya yang dikuasai oleh organisasi yakni penjangkauan, media dan publikasi, healing, pemulihan adiksi, konsultansi, penggalangan dan penyaluran dana, pengelolaan restorasi dan manajemen hutan serta kompetensi lainnya seperti terlihat dalam grafik.

4.8 Transparansi Informasi

Soal transparansi organisasi menjadi komponen terakhir yang ditanyakan kepada organisasi/lembaga dalam survei verifikasi. Komponen ini meliputi informasi sumber pendanaan serta visibilitas organisasi yang digali melalui kontak organisasi, PIC organisasi, website, serta media sosial.

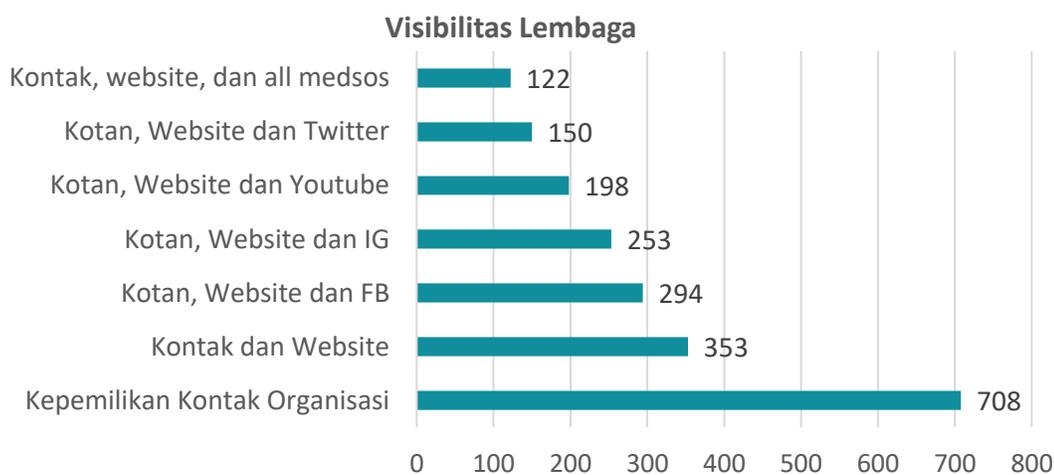
Dari informasi yang dihimpun dalam survei ditemukan informasi terkait pendanaan organisasi. Berikut matriks pendanaan organisasi yang diisi oleh responden/ organisasi:

Tabel 4.7 Transparansi Informasi

No	Sumber Pendanaan	Jumlah yang mengisi
1	Pemerintah	57
2	Donor internasional	37
3	Sumbangan Individu	32
4	Iuran anggota	20
5	Donor lokal	12
6	Penggalangan dana publik (Filantropi)	6
7	Unit usaha organisasi	6
8	Perusahaan	3

Data yang ditampilkan dalam tabel di atas adalah data *single click* yakni responden yang hanya mengisi 1 pilihan jawaban. Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa lembaga yang hanya memilih sumber pendanaan dari pemerintah sebanyak 57 lembaga, donor internasional sebanyak 37 organisasi, sumbangan individu sebanyak 32 lembaga, iuran anggota sebanyak 20 lembaga, donor lokal sebanyak 12 lembaga, penggalangan dana public (filantropi) dan unit usaha organisasi masing-masing sebanyak 6 lembaga dan perusahaan sebanyak 3 lembaga.

Selain soal pendanaan, transparansi informasi juga digali dengan meminta responden mengisi kelengkapan informasi organisasi, yakni nomor kontak, email, alamat website, serta media sosial. Berikut grafik kepemilikan kontak organisasi sebagai bagian dalam cakupan visibilitas organisasi.



Grafik 4.14. Visibilitas Lembaga

Dari 709 organisasi yang mengikuti verifikasi data OMS, sebanyak 708 organisasi memiliki nomor kontak organisasi, sedangkan yang memiliki kelengkapan informasi kontak organisasi dan website sebagai sarana akuntabilitas organisasi ditemukan sebanyak 353 organisasi; kepemilikan kontak, website dan akun media sosial Facebook sebanyak 294 organisasi; kontak, web dan IG sebanyak 253 organisasi; kontak, web, dan Youtube sebanyak 198 organisasi; kontak, website dan twitter sebanyak 150 organisasi dan yang memiliki kelengkapan kontak, website dan seluruh media sosial sebanyak 122 organisasi.

BAGIAN 5

ANALISIS TEMUAN



5.1 Analisis Isu Utama Organisasi berdasarkan Cakupan Area Kerja

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan mengenai temuan-temuan kunci selama proses verifikasi data OMS, baik tingkat partisipasi, eksistensi organisasi, manajemen organisasi, legalitas organisasi, akuntabilitas keuangan (transparansi), transparansi informasi organisasi, serta fokus isu organisasi dan kompetensi yang dimiliki oleh organisasi.

Sebaran 9 isu utama berdasarkan provinsi dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Sebaran Isu 9 Utama per Provinsi

PROVINSI	IU-1	IU-2	IU-3	IU-4	IU-5	IU-6	IU-7	IU-8	IU-9
Bali		2				7	1	4	
Bangka Belitung		2	1				1	3	1
Banten	6	7	1		3	4	2	9	1
Bengkulu	1					1		4	
DI Yogyakarta	2	1	1	1		1	1	10	1
DKI Jakarta	9	5	4	7	2	6	5	19	4
Gorontalo			1					3	1
Jambi		2	1					3	1
Jawa Barat	5	6	8	8		11	2	22	8
Jawa Tengah	5	1	5			9	1	19	5
Jawa Timur	2	3	4	1		2	5	20	4
Kalimantan Barat	2	1	1		1	4	3	7	1
Kalimantan Selatan			2					3	2
Kalimantan Tengah						1		2	
Kalimantan Timur		1	1			1	3	4	1

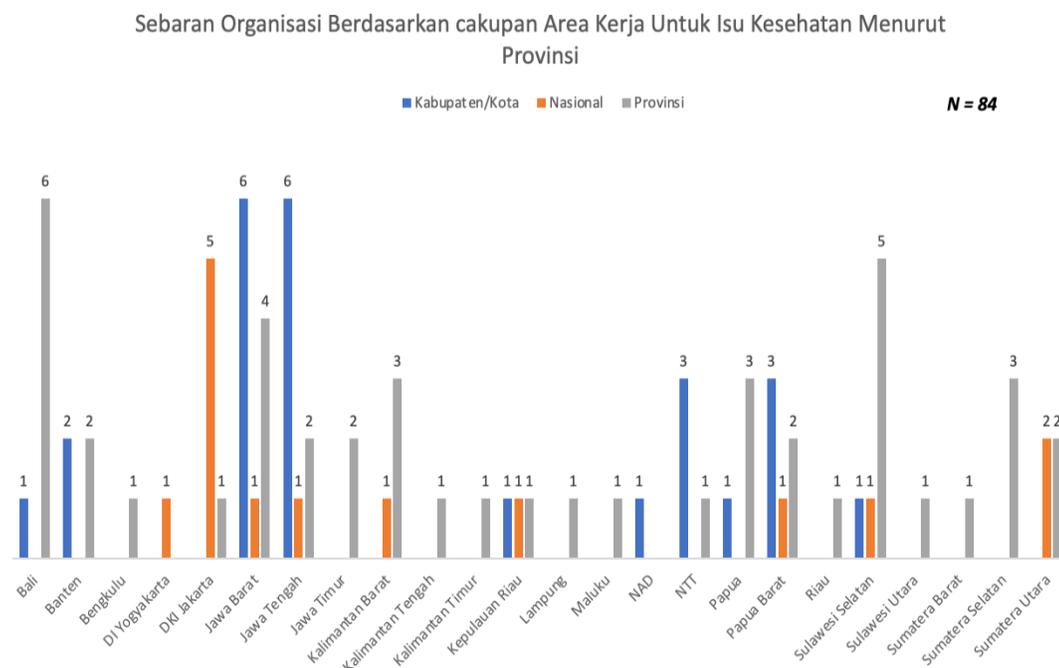
Kalimantan Utara		1					1	3	
Kepulauan Riau			2			3		1	2
Lampung		1	7			1		2	7
Maluku		1	1	1		1		5	1
Maluku Utara	1		3					1	3
NAD	5	4				1	2	7	
NTB	1	1	4	1	2		3	6	4
NTT	1	1	3	1		4	4	5	3
Papua			1			4		2	1
Papua Barat	1		1			6		3	1
Riau	2					1		5	
Sulawesi Barat	1	1	1					1	1
Sulawesi Selatan	4	8		1		7	3	19	
Sulawesi Tengah	1		2				1	7	2
Sulawesi Tenggara			2	1	1			5	2
Sulawesi Utara			1			1		2	1
Sumatera Barat	2					1	1	5	
Sumatera Selatan	3		2			3		5	2
Sumatera Utara	5	6	9	1	1	4		15	9
TOTAL	59	55	69	23	10	84	39	231	69

Keterangan:

- IU-1 : Hak Asasi Manusia dan demokrasi;
- IU-2 : Pelayanan publik;
- IU-3 : Perlindungan lingkungan hidup dan aksi iklim (*climate action*);
- IU-4 : Keberagaman, kebhinekaan, toleransi, dan perdamaian;
- IU-5 : Buruh dan tenaga kerja;
- IU-6 : Kesehatan;
- IU-7 : Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- IU-8 : Pemberdayaan masyarakat, termasuk dan tidak terbatas pada perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; dan
- IU-9 : Perlindungan dan perluasan bagi kelompok terpinggir dan rentan.

Isu utama lembaga responden akan dianalisa berdasarkan cakupan area kerja (nasional, provinsi, kabupaten/kota).

Sebagai contoh gambaran, berdasarkan cakupan area kerja organisasi yang memiliki fokus utama pada isu Kesehatan bisa dilihat dalam grafik berikut ini:



Grafik 5.1 Sebaran Organisasi Berdasarkan Cakupan Area Kerja untuk Isu Kesehatan Menurut Provinsi

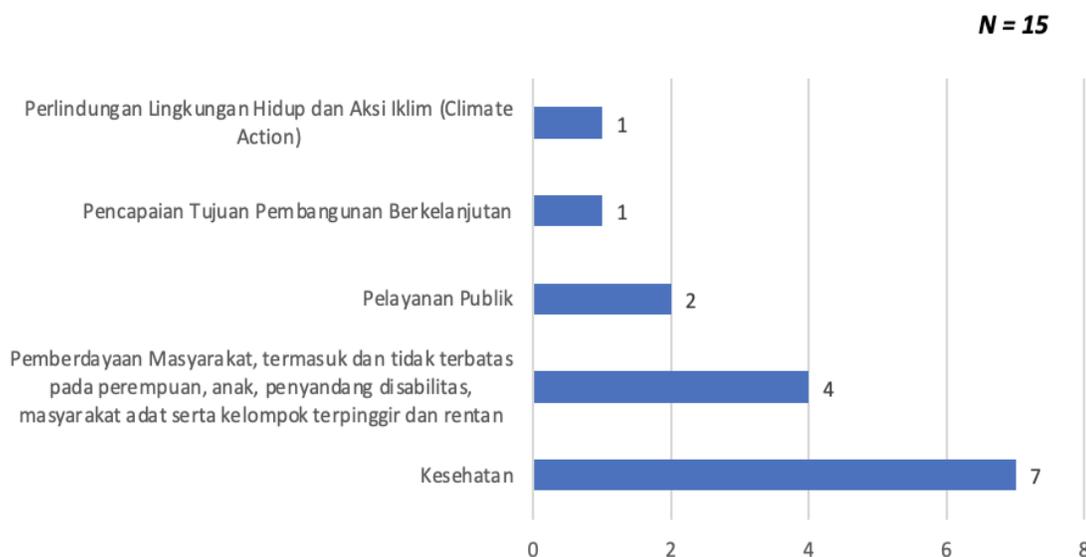
Dari 709 lembaga, yang fokus di isu Kesehatan berjumlah 84 lembaga. Berdasarkan cakupan area kerja, 14 lembaga memiliki cakupan area kerja nasional, 45 lembaga lainnya memiliki area kerja di provinsi dan 25 lembaga lainnya berarea kerja di kabupaten/kota.

Lembaga yang bergerak dalam isu Kesehatan terkonsentrasi di 24 provinsi, yakni Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Nangroe Aceh Darusalam, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Untuk wilayah dengan area kerja nasional terbanyak berada di DKI Jakarta yakni ada 5 lembaga yang memiliki konsen isu Kesehatan dengan area kerja nasional. Sedangkan untuk area kerja provinsi terbanyak untuk isu Kesehatan berada di provinsi Bali yakni ada 6 lembaga, dan area kerja kabupaten/kota terbanyak untuk isu Kesehatan berada di provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yakni terdapat 6 lembaga.

Selain fokus isu yang telah dijelaskan sebelumnya, Lembaga/organisasi yang mengikuti proses verifikasi data OMS juga bergerak dalam isu-isu lainnya. Seperti dijelaskan sebelumnya, isu unik lainnya yang dilakukan oleh organisasi mencapai 89 isu. Dalam konteks tersebut, bagian ini akan memberikan gambaran singkat mengenai isu lainnya yang juga digiatkan oleh organisasi diberbagai daerah di Indonesia. Bila melihat lebih dalam (*zoom in*), berikut gambaran salah satu potret sebaran isu utama dan isu lainnya yang digiatkan oleh organisasi/lembaga di Provinsi Bali:

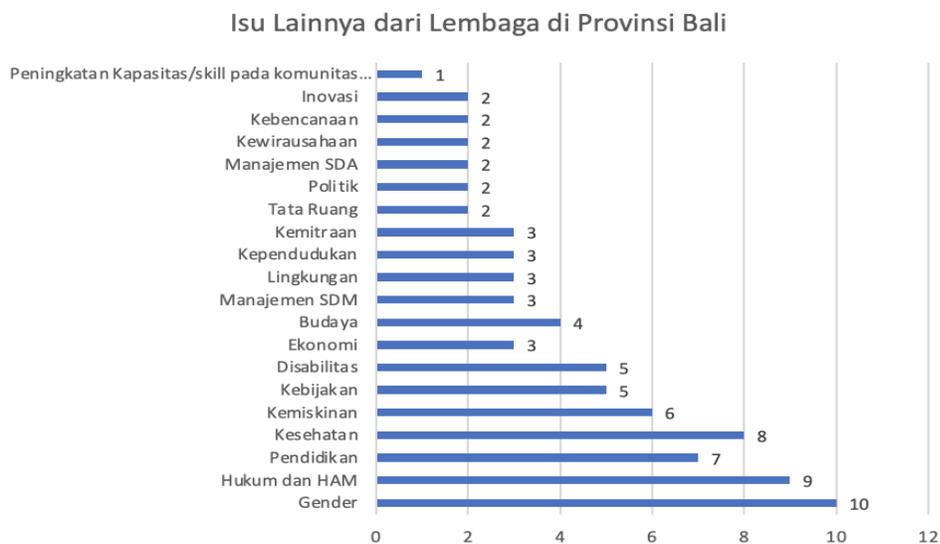
Contoh: Fokus Isu Lembaga di Provinsi Bali



Grafik 5.2 Fokus Isu Lembaga di Provinsi Bali (Contoh)

Di provinsi Bali terdapat 15 lembaga yang turut berpartisipasi dalam survei verifikasi data OMS. Dari 15 organisasi tersebut, sebanyak 7 lembaga fokus di isu utama Kesehatan, 4 lembaga fokus di isu utama soal pemberdayaan masyarakat, termasuk dan tidak terbatas pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat serta kelompok rentan lainnya, 2 lembaga koncern di isu pelayanan public, dua lembaga lainnya koncern di isu pencapaian tujuan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup dan aksi iklim (*climate action*).

Selain isu utama, ke-15 lembaga tersebut juga memiliki isu organisasi lainnya. Berikut daftar isu lainnya dari 15 lembaga di Provinsi Bali yang mengikuti verifikasi data OMS.



Grafik 5.3 Isu Lainnya dari OMS di Provinsi Bali

Selain di lima fokus isu utama yang dijelaskan sebelumnya, ke lima belas organisasi yang aktif di Bali juga memiliki isu lain yang menjadi perjuangan organisasi. Seperti terlihat dalam grafik 5.3 di atas, 10 lembaga memiliki isu lain tentang gender, 9 lembaga koncern di isu hukum dan HAM, 8 di isu Kesehatan, 7 lembaga di isu pendidikan, 6 lembaga koncern juga diisu kemiskinan, 5 lembaga koncern di isu kebijakan dan disabilitas dan isu lainnya.

5.2 Grade Organisasi

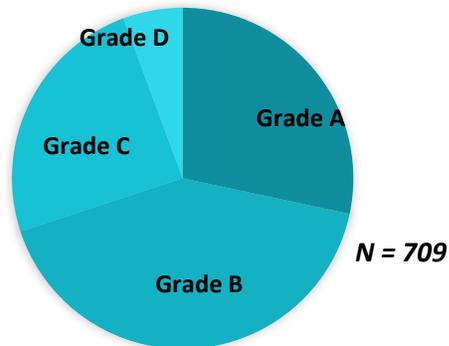
Setelah melalui proses seleksi, bagian ini akan menjelaskan proses kategorisasi organisasi (*grading*). Proses pengkategorisasian ini mempertimbangkan kelengkapan informasi dari OMS ketika menjawab pertanyaan verifikasi.

Terdapat 4 rumpun yang digunakan berdasarkan informasi yang dihimpun dalam survei verifikasi data OMS yakni:

1. Tata kepengurusan yang baik (manajemen organisasi)
2. Manajemen keuangan yang terbuka dan terpercaya (transparansi)
3. Transparansi informasi
4. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan

Berikut gambaran peta organisasi setelah melewati proses kategorisasi:

Jumlah Dan Persentase Grade Organisasi



Grafik 5.4 Jumlah dan Persentase Grade Organisasi

Grafik di atas adalah jumlah lembaga berdasarkan grade/kategorisasi lembaga bertingkat. Mulai dari Grade A, Grade B, Grade C, dan Grade D. Dengan mengacu pada indikator LSM, dari total 709 lembaga, ditemukan bahwa jumlah yang masuk kategori Grade A sebanyak 201 lembaga, Grade B sebanyak 295 lembaga, Grade C sebanyak 173 lembaga, dan Grade D sebanyak 40 lembaga.

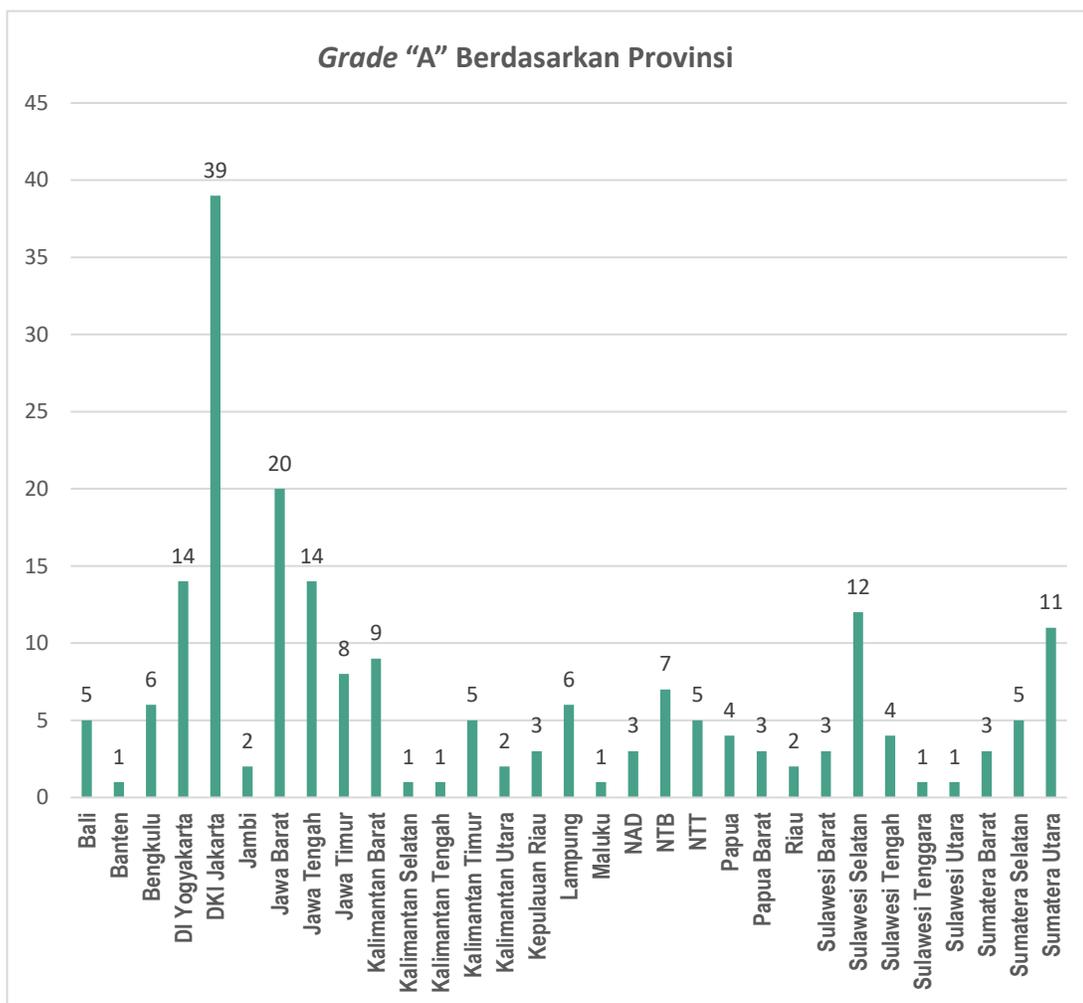
5.2.1 Organisasi Kategori *Grade A*

Dari daftar pertanyaan yang telah diajukan kepada responden/organisasi, proses selanjutnya adalah mengkategorisasi organisasi (*grade*). *Grade* terbaik ditandai dengan daftar isian informasi yang lengkap, baik dalam aspek eksistensi organisasi, manajemen organisasi, legalitas organisasi, akuntabilitas keuangan (transparansi), transparansi informasi organisasi serta fokus isu organisasi dan kompetensi yang dimiliki oleh organisasi.

Kategori *Grade A* mengacu pada indikator pertanyaan kunci yang disampaikan dalam survei verifikasi melalui Google Form. Adapun komponen pertanyaan kunci dalam *cluster Grade A* yakni:

- 1) Kepemilikan kantor; 2) AD/RT; 3) Visi&Misi; 4) Struktur organisasi; 5) Isu utama; 6) Keahlian utama; 7) Non partisan; 8) Program rutin; 9) AHU/SKT; 10) Kemitraan; 11) Eksistensi organisasi > 5 tahun; (12) Kepemilikan rekening bank a.n organisasi; 13) *Tools* keuangan; 14) Audit eksternal 2 tahun; 15) SOP keuangan; 16) NPWP; 17) Laporan pajak; 18) Penerima manfaat; dan 19) Visibilitas (website, media sosial, kontak person)

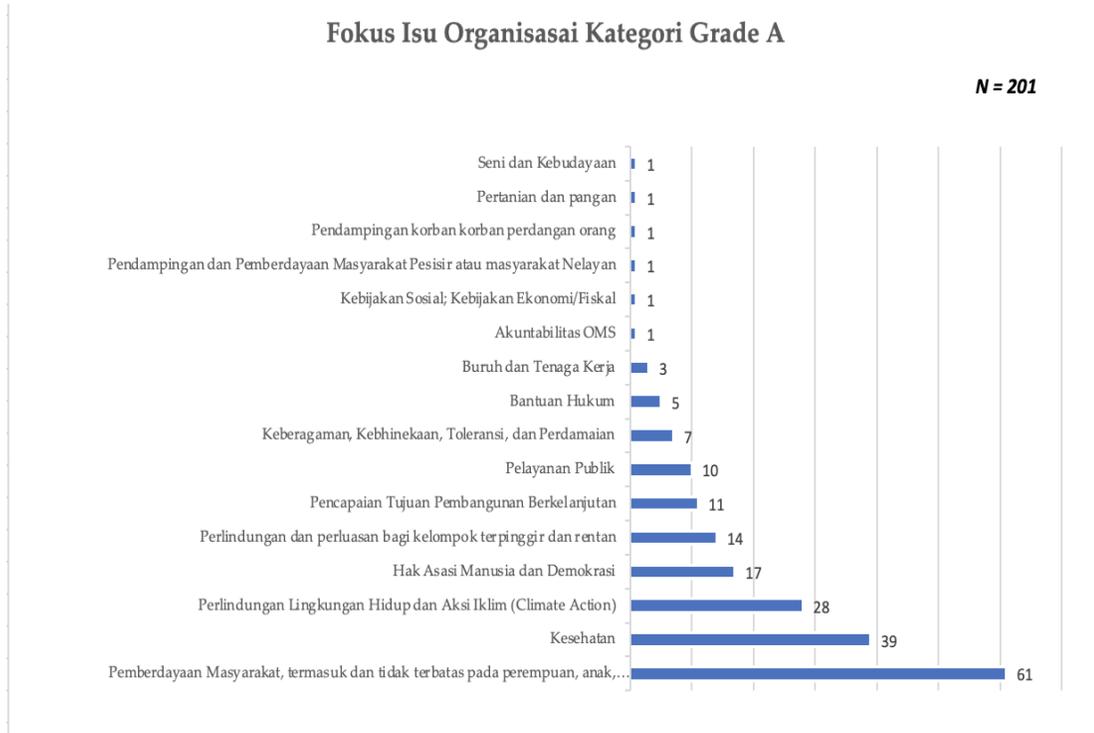
Dari informasi yang disampaikan oleh organisasi ditemukan sebanyak 201 lembaga yang mengisi seluruh komponen yang masuk dalam pertanyaan untuk Grade A. Berikut sebaran provinsi domisili Lembaga-lembaga yang masuk dalam kategori Grade A:



Grafik 5.5 OMS Grade A Berdasarkan Provinsi

Berdasarkan data di atas, ke-201 OMS yang masuk dalam kategori grade A berada di 31 provinsi. Sebaran organisasi dengan grade A paling banyak berasal dari DKI Jakarta yakni sebanyak 39 lembaga, Jawa Barat sebanyak 20 lembaga, Yogyakarta dan Jawa Tengah masing-masing sebanyak 14 lembaga, Sulawesi Selatan sebanyak 12 lembaga, dan Sumatera Utara sebanyak 11 lembaga. Daftar nama ke-201 organisasi yang masuk dalam kriteria Grade A dijelaskan di **Lampiran 2**.

Bila diklaster berdasarkan isu, dari 201 lembaga yang masuk dalam kategori *grade A* bisa dilihat dari grafik berikut ini:



Grafik 5.6 Fokus Isu Organisasi Kategori Grade A

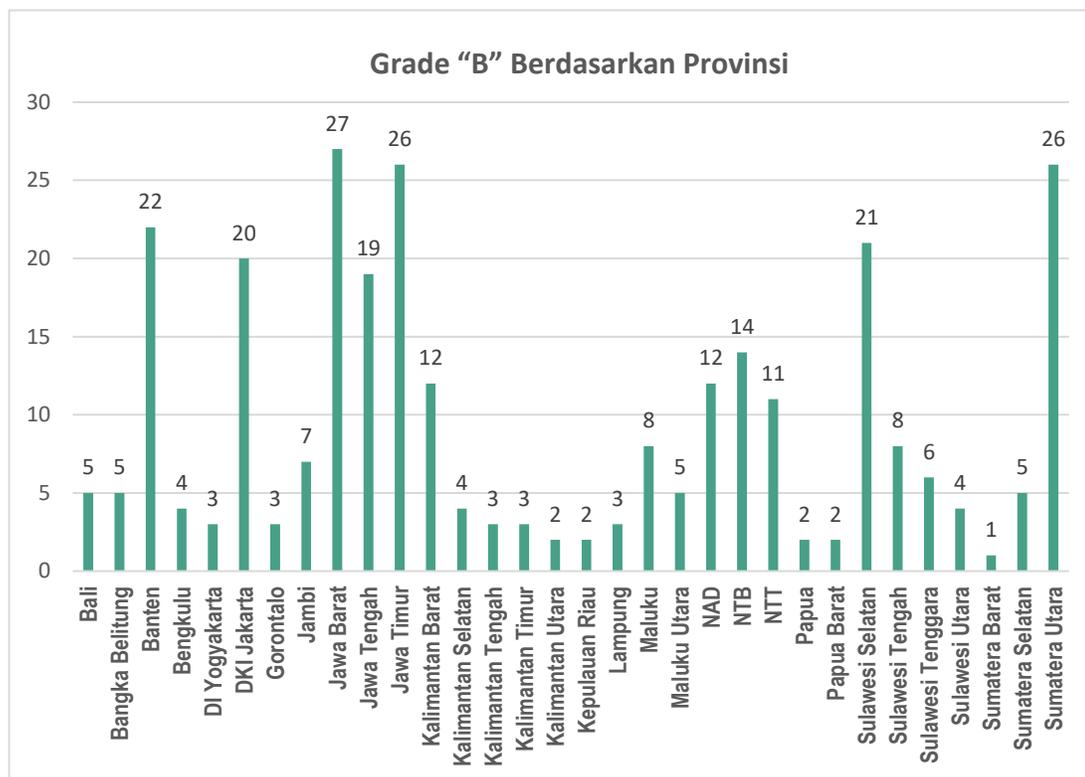
Dari grafik di atas dapat dilihat 3 fokus isu terbanyak yakni untuk Pemberdayaan masyarakat termasuk dan tidak terbatas pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat serta kelompok terpinggir lainnya yakni sebanyak 61 lembaga, Kesehatan sebanyak 39 lembaga, Perlindungan lingkungan hidup (*climate action*) sebanyak 28 lembaga.

5.2.2 Organisasi Kategori Grade B

Berbeda dengan *grade A*. Kategorisasi *grade B* mengacu pada jawaban dari 17 indikator pertanyaan kunci, yakni meliputi:

- 1) Kepemilikan kantor; 2) AD/RT; 3) Visi&Misi; 4) Struktur organisasi; 5) Isu utama; 6) Keahlian utama; 7) Non partisan; 8) Program rutin; 9) AHU/SKT; 10) Kemitraan; 11) Eksistensi organisasi 2-5 tahun; 12) Kepemilikan rekening bank a.n organisasi; 13) Tools keuangan; 14) SOP keuangan; 15) NPWP; 16) Penerima manfaat; DAN 17) Visibilitas (website, media sosial, kontak person).

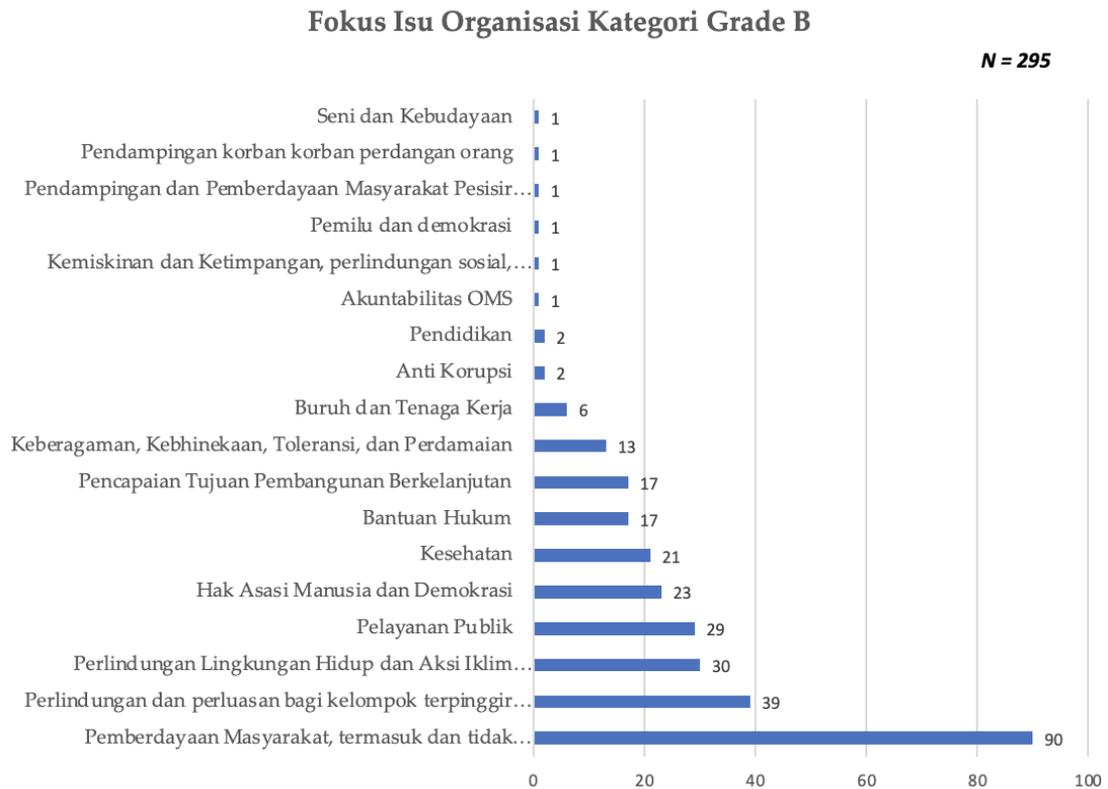
Dari informasi yang disampaikan oleh responden, ditemukan sebanyak 295 lembaga yang memenuhi/menjawab unsur-unsur indikator *grade* B di atas. Berikut sebaran provinsi domisili lembaga-lembaga yang masuk dalam kategori *grade* B:



Grafik 5.7 OMS Grade B Berdasarkan Provinsi

Berdasarkan data pada grafik di atas, 295 lembaga yang masuk kategori grade B tersebar di 32 provinsi. Lembaga dengan *grade* B paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat yakni mencapai 27 lembaga, Jawa Timur dan Sumatera Utara masing-masing sebanyak 26 lembaga, Banten sebanyak 22 lembaga, Sulawesi Selatan sebanyak 21 lembaga, DKI Jakarta sebanyak 20 lembaga dan Jawa Tengah sebanyak 19 lembaga. Sedangkan provinsi yang menyumbangkan lembaga grade B paling sedikit yakni Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 lembaga, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Papua dan Papua Barat masing-masing menyumbang 2 lembaga. Daftar nama ke-295 organisasi yang masuk dalam kriteria *grade* B dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Bila diklaster berdasarkan isu, dari 295 lembaga yang masuk dalam kategori grade B bisa dilihat dari grafik berikut ini:



Grafik 3.8 Fokus Isu Organisasi Kategori Grade B

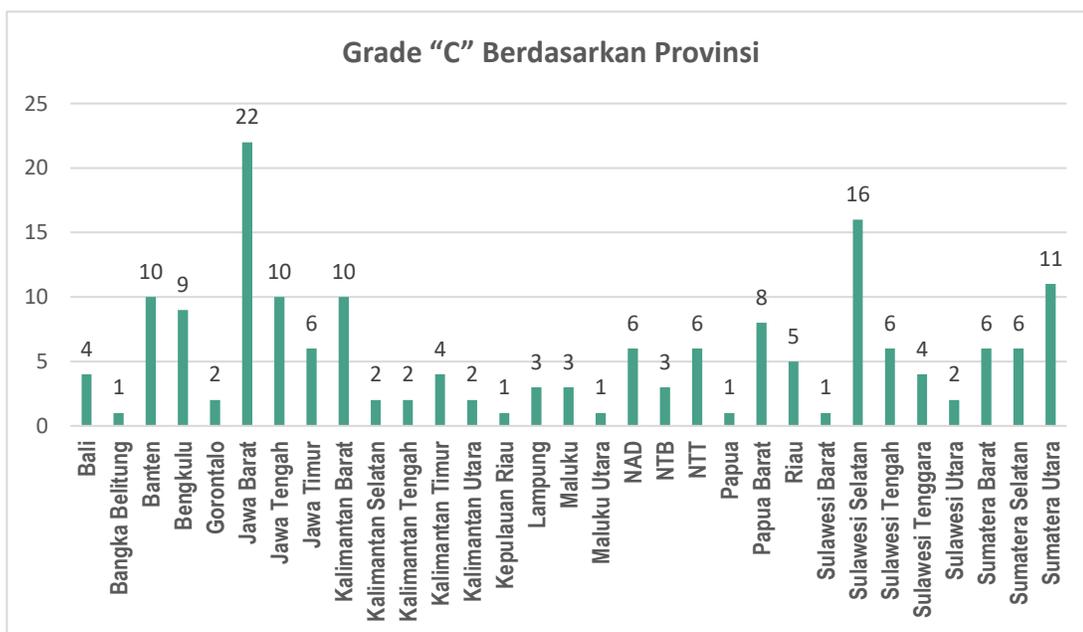
Grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas atau sebanyak 90 lembaga yang masuk dalam kategori grade B lebih banyak *concern* pada isu utama pemberdayaan masyarakat. Fokus isu utama lainnya adalah perlindungan dan perluasan bagi kelompok rentan sebanyak 39 lembaga, isu perlindungan lingkungan hidup sebanyak 30 lembaga, isu pelayanan publik sebanyak 29 lembaga, isu Hak Asasi Manusia dan Demokrasi sebanyak 23 lembaga, isu Kesehatan sebanyak 21 lembaga, isu bantuan hukum dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan masing-masing sebanyak 17 lembaga, keberagaman, kebhinekaan, toleransi dan perdamaian sebanyak 13 lembaga, buruh dan tenaga kerja sebanyak 6 lembaga, anti korupsi dan pendidikan sebanyak masing-masing 2 lembaga, akuntabilitas OMS, kemiskinan dan ketimpangan, pemilu dan demokrasi, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, pendampingan korban perdagangan orang serta seni dan kebudayaan masing-masing sebanyak 1 lembaga.

5.2.3 Organisasi Kategori Grade C

Sama seperti proses mengklaster grade A dan grade B, untuk menghasilkan organisasi yang masuk dalam grade C pun melalui proses check list 12 indikator pertanyaan kunci grade C. Adapun list 12 indikator pertanyaan untuk mengumpulkan organisasi dalam grade C adalah sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kantor; 2) AD/RT; 3) Visi&Misi; 4) Struktur organisasi; 5) Isu utama; 6) Keahlian utama; 7) Non partisan; 8) SKT/akta notaris; 9) Eksistensi organisasi 2-5 tahun; 10) Kemitraan; 11) Penerima manfaat; dan 12) Visibilitas (media sosial, kontak person).

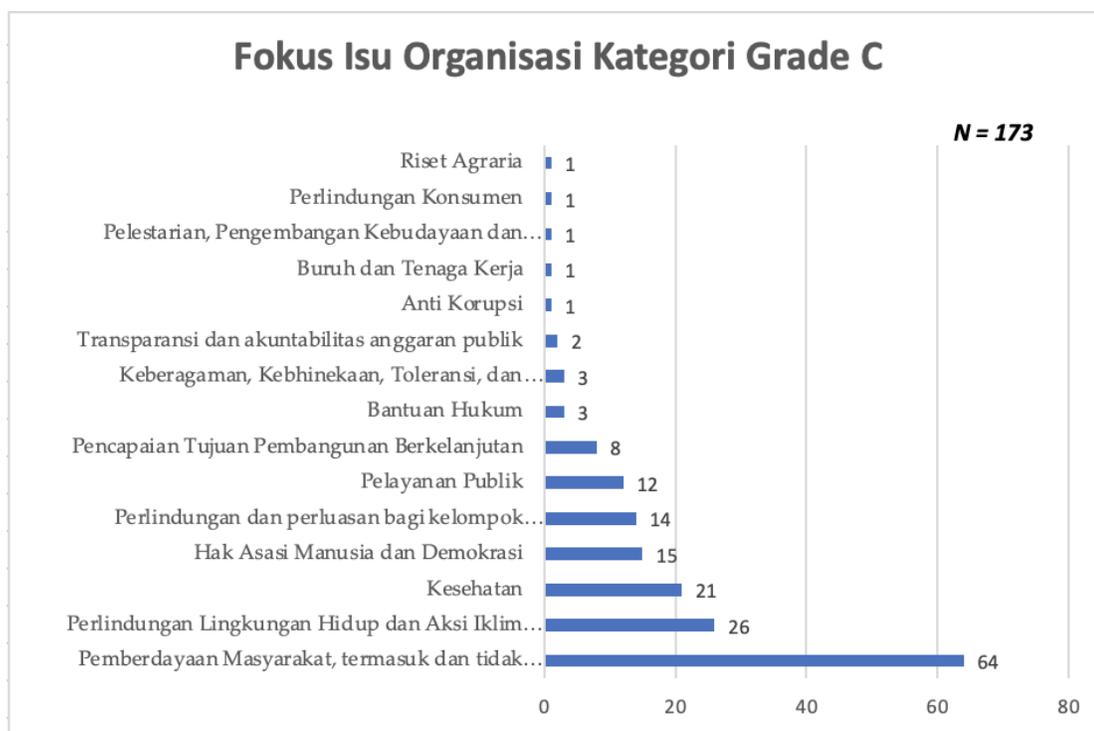
Dari 709 lembaga, terdapat sebanyak 173 lembaga yang memenuhi/menjawab unsur-unsur indikator pertanyaan kunci *grade C*. Berikut sebaran provinsi domisili lembaga-lembaga yang masuk dalam kategori *Grade C*:



Grafik 5.9 OMS Grade C Berdasarkan Provinsi

Dari grafik di atas terlihat bahwa lembaga dengan kategori grade C berada di 31 provinsi. Sebaran lembaga dengan *grade C* paling banyak berada di Provinsi Jawa Barat yakni sebanyak 22 lembaga, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 16 lembaga, Sumatera Utara sebanyak 11 lembaga, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Barat masing-masing sebanyak 10 lembaga. Daftar nama ke-173 organisasi yang masuk dalam kriteria *Grade C* dijelaskan pada **Lampiran 4**.

Sedangkan berdasarkan fokus isu utama 173 organisasi/lembaga yang masuk kategori *grade C* dijelaskan pada grafik di bawah ini.



Grafik 5.10 Fokus Isu Organisasi Grade C

Berdasarkan data pada grafik di atas, terdapat sebanyak 15 isu yang menjadi fokus utama organisasi/lembaga dengan *grade C*. Tiga isu terbanyak lembaga dengan *grade C* adalah 64 organisasi/lembaga fokus di isu pemberdayaan, 26 lembaga di isu perlindungan lingkungan hidup, dan 21 lembaga di isu kesehatan.

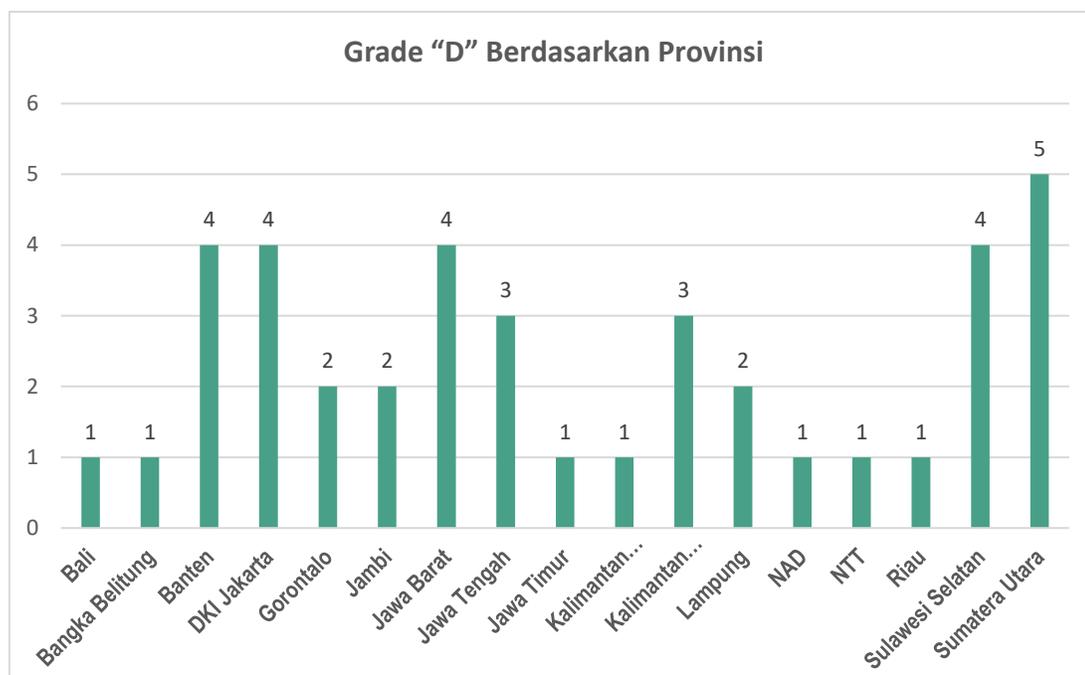
5.2.4 Organisasi Kategori *Grade D*

Dalam proses kategorisasi, *grade D* merupakan kategori terakhir yang dibuat untuk mengklaster OMS yang mengikuti proses verifikasi data OMS. Indikator untuk menentukan *grade D* ini tidak sekompleks indikator *grade A* dan *B*.

Kategori *Grade D* mengacu pada jawaban dari 11 indikator pertanyaan kunci *Grade D*. Adapun 11 indikator pertanyaan kunci dalam *cluster Grade D* adalah sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kantor; 2) AD/RT; 3) Visi&Misi; 4) Struktur organisasi; 5) Isu utama; 6) Keahlian utama; 7) Non partisan; 8) Minimal memiliki akta notaris; 9) Eksistensi organisasi < 2 tahun; 10) Penerima manfaat; 11) Visibilitas (media sosial, kontak person).

Berdasarkan analisa *grade D*, ditemukan sebanyak 40 lembaga yang memenuhi kriteria. Berikut sebaran provinsi domisili lembaga-lembaga yang masuk dalam kategori *Grade D*:

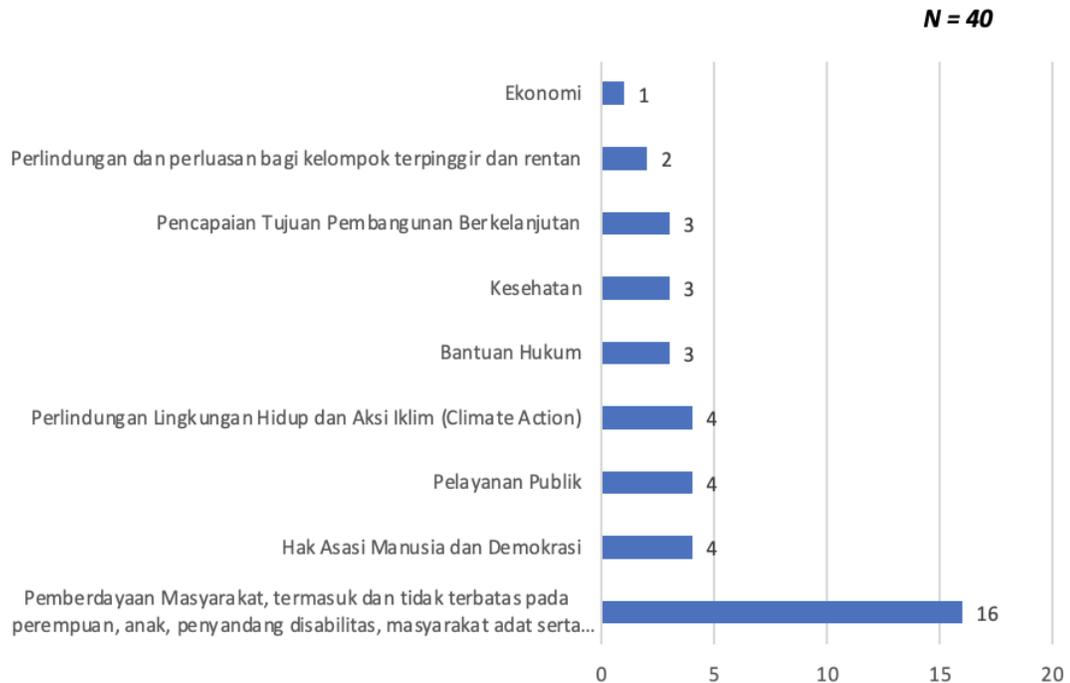


Grafik 5.11 OMS Grade D Berdasarkan Provinsi

Berdasarkan data pada grafik di atas, 40 lembaga dengan kategori *grade D* berada di 17 provinsi. Provinsi dengan jumlah OMS *grade D* terbanyak berada di Provinsi Sumatera Utara yakni sebanyak 5 lembaga, kemudian Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan masing-masing sebanyak 4 lembaga, Jawa Tengah dan Kalimantan Utara masing masing sebanyak 3 lembaga, Gorontalo, Jambi, dan Lampung masing-masing 2 lembaga dan Bali, Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nangroe Aceh Darusalam, Nusa Tenggara Timur dan Riau maing-masing 1 lembaga. Daftar nama 40 lembaga yang masuk dalam kategori *grade D* dijelaskan pada **Lampiran 5**.

Adapun fokus isu OMS grade D dijelaskan pada grafik di bawah ini.

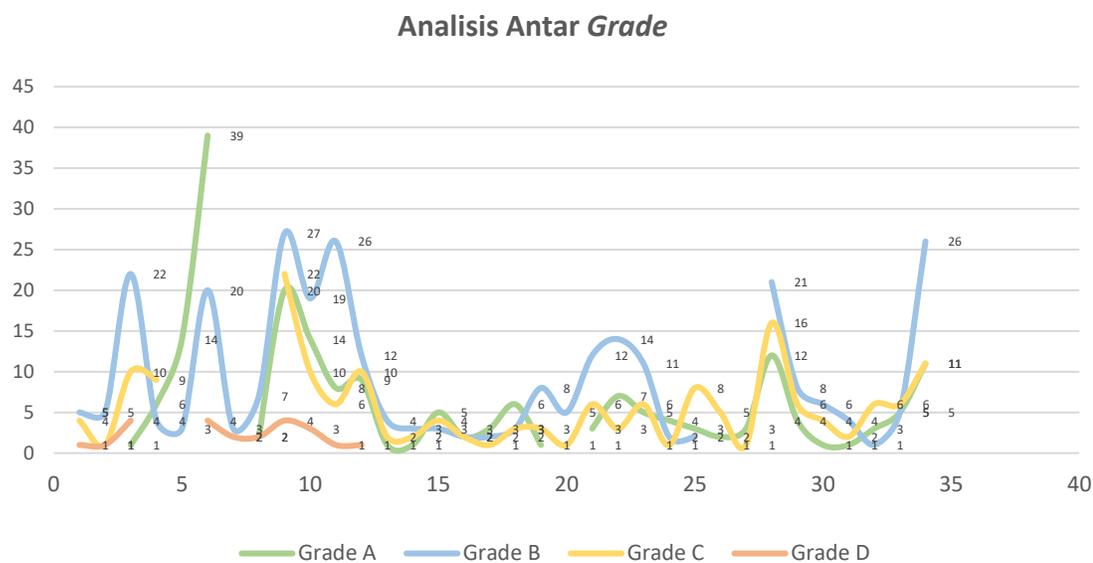
Fokus Isu Organisasi Kategori Grade D



Grafik 5.12 Fokus Isu OMS Grade D

Dari 40 OMS yang masuk dalam daftar grade D terdapat 9 fokus isu yang digiatkan oleh OMS tersebut. Isu utama yang paling banyak digeluti adalah isu pemberdayaan masyarakat yakni sebanyak 16 lembaga.

5.3 Analisa antar *Grade*



Grafik 5.13 Analisis 709 Lembaga antar *Grade*

Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa sebaran lembaga berdasarkan grade A,B,C, dan D per provinsi sangat beragam. Adapun data sebaran per provinsi dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2 Sebaran 709 Lembaga Berdasarkan *Grade*

Provinsi	Grade A	Grade B	Grade C	Grade D
Bali	5	5	4	1
Bangka Belitung	5	5	1	1
Banten	1	22	10	4
Bengkulu	6	4	9	
DI Yogyakarta	14	3		
DKI Jakarta	39	20		4
Gorontalo	3	3	2	2
Jambi	2	7		2
Jawa Barat	20	27	22	4
Jawa Tengah	14	19	10	3
Jawa Timur	8	26	6	1
Kalimantan Barat	9	12	10	1
Kalimantan Selatan	1	4	2	

Kalimantan Tengah	1	3	2	
Kalimantan Timur	5	3	4	
Kalimantan Utara	2	2	2	3
Kepulauan Riau	3	2	1	
Lampung	6	3	3	2
Maluku	1	8	3	
Maluku Utara		5	1	
NAD	3	12	6	1
NTB	7	14	3	
NTT	5	11	6	1
Papua	4	2	1	
Papua Barat	3	2	8	
Riau	2		5	1
Sulawesi Barat	3		1	
Sulawesi Selatan	12	21	16	4
Sulawesi Tengah	4	8	6	
Sulawesi Tenggara	1	6	4	
Sulawesi Utara	1	4	2	
Sumatera Barat	3	1	6	
Sumatera Selatan	5	5	6	
Sumatera Utara	11	26	11	5
TOTAL	201	295	173	40

BAGIAN 6

TANTANGAN, KESIMPULAN, & REKOMENDASI



6.1 Tantangan

Secara umum, penelitian ini menemukan beberapa tantangan dalam prosesnya, yaitu:

- Tingkat partisipasi responden rendah. Ada 810 OMS yang menolak melakukan proses verifikasi dengan berbagai alasan. Dan dari 2.922 data base-line akhir, hanya 806 OMS yang melanjutkan proses verifikasi hingga tahap pengisian form.
- Organisasi kemasyarakatan belum melihat verifikasi data OMS sebagai sebuah peluang bagi keberlanjutan organisasi. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena belum tersosialisasikannya secara luas tentang rancangan perpres dana abadi OMS.
- Di sisi lain, muncul beberapa ekspektasi yang berlebih dari OMS, ketika mengetahui bahwa verifikasi ini dilakukan dalam kerangka advokasi Dana Abadi OMS. Beberapa OMS merasa akan ada tindak lanjut secara konkret terkait pendanaan kepada mereka, bahkan sebagian OMS menghubungi tim verifikator secara langsung untuk menanyakan tindak lanjut pasca-verifikasi.
- Muncul kejenuhan dan keengganan OMS terhadap proses verifikasi yang berkali-kali dilakukan. Kasus penolakan beberapa OBH yang merasa sudah diverifikasi dengan valid oleh Kemenkumham terjadi.

6.2 Kesimpulan

- Definisi ormas dalam beberapa kebijakan yang ada terlalu luas. Ini memunculkan kerumitan operasional, sehingga untuk mengukur eligibilitas OMS, perlu dibuat kategorisasi dan definisi turunan yang membatasi ruang lingkup.
- Dari data yang berhasil dikumpulkan, ditemukan ketidakseimbangan data OMS dari berbagai kota/provinsi. Ada 11 provinsi yang memiliki keterwakilan OMS < 10 organisasi, yaitu: Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau,, Maluku Utara, Papua, Riau, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.

- Di sisi lain, terdapat dua payung kewenangan dan pemegang kebijakan yang mengakibatkan kesemrawutan data OMS, yakni antara Kemenkumham (AHU) dengan Kemendagri (SKT).
- Secara khusus, dalam hal pendataan Ormas, terdapat ketidaksinkronan data antara Kesbangpol di berbagai wilayah dengan Kemendagri (Pusat). Tidak ada data terintegrasi yang bisa diakses publik. Ini berbeda dengan data AHU Kemenkumham yang terpusat.
- Riset ini menunjukkan bahwa OMS dalam kategori Grade A dan B cukup besar (70%) dari N akhir, sementara untuk kategori Grade C dan D adalah 30%. Dengan demikian, tingkat keberdayaan dan akuntabilitas OMS pada dasarnya cukup tinggi.

6.3 Rekomendasi

- Perlunya definisi yang lebih tegas dalam konteks pembedaan Ormas dan LSM, terutama terkait dengan kelompok sasaran (penerima) Dana Abadi OMS.
- Perlunya mendorong kajian lebih lanjut untuk menstrukturisasi metodologi dan proses verifikasi berjenjang seperti yang telah dilakukan ini untuk menjadi standar proses verifikasi baku yang diperluas cakupan dan sarannya.
- Perlunya verifikasi faktual, mengingat survei awal ini didasarkan pada metodologi pertanyaan tertutup (pengakuan partisipan). Verifikasi faktual dapat dilakukan pada OMS dengan kategori Grade A dan Grade B (70%).
- Perlunya riset lebih lanjut berbasis wilayah (kota-kabupaten) dengan tujuan: (1) Data-basing keseluruhan Ormas yang ada di kota/kabupaten sasaran; (2) Memetakan ketidaksinkronan data berbasis AHU-SKT, dan ketidaksinkronan data antara daerah-pusat. Lebih jauh, riset lanjutan ini juga dapat diarahkan untuk (1) Memetakan tingkat ketahanan Ormas; dan (3) Memetakan jenis dan kategorisasi Ormas.
- Perlunya merumuskan kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan OMS, mengingat masih banyak OMS yang belum memenuhi standar minimal eligibilitas dan akuntabilitas (Grade C dan Grade D).

DAFTAR PUSTAKA



- Anggara, Krisna. 2008. *Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Tesis, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008).
- Asian Development Bank. 2008. *Civil Society Organization; Sourcebook A Staff Guide to*
- Billah, M.M. 1990. *Peran Ornop Dalam Proses Demokratisasi yang Berkedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Bucoy, Juliet. 2011. *NGO Governance: Management and Accountability*. (Trinitian Scholar, Trinity University of Asia).
- Budairi, Muhammad. 2002. *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*.(Jakarta: E-law)
- Cooperation With Civil Society Organization*. (Asian Development Bank).
- Fakih, Mansour. 1996. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Gaffar, A. 2002. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Hadad, Ismi. "Menampilkan Potret Pembangunan Berwajah Swadaya Masyarakat" dalam *Majalah Prisma*, No. 4, April 1983.
- Nata Praja, Ageng. 2009. *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobogan*. (Tesis, Universitas Diponegoro).
- Pulu. Lili, dkk. 2005. *Standar Minimal Akuntabilitas LSM*. (Jakarta: Konsil LSM Indonesia).

Sandovi, Lussy dan Eka Vidya Putra. 2018. "Implementasi *Good NGO Governance* Pada Lembaga Swadaya (LSM) Lokal" dalam *Jurnal Perspektif*, Vol. 1 NO. 4. DOI: <http://dx.doi.org/10.24036/perspektif.v1i4.48>

UNDP. 2006. *UNDP and Civil Society Organizations: A Toolkit for Strengthening Partnerships*, (New York: NY).

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Lainnya

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) No. 8/1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang Undang Dasar 1945

Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Swakelola

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000

LAMPIRAN 1: Data lembaga yang tidak sesuai dengan definisi berjumlah 49 lembaga

No	Nama Organisasi	Provinsi
1	DPD KPPI Prov Kep Babel	Bangka Belitung
2	Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Serang	Banten
3	Satria Garuda Banten	Banten
4	Komunitas Driver Banten	Banten
5	PD. Pemuda Panca Marga Provinsi Banten	Banten
6	Jawara Banten Bersatu	Banten
7	Forum kelompok tani holopis kuntul baris	Banten
8	Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI)	Banten
9	Pemersatu satria banten	Banten
10	Banten Jaya Satu	Banten
11	Warga Jaya Provinsi Banten	Banten
12	PERGUNU	Banten
13	DPD Gograber Indonesia Provinsi Banten	Banten
14	Kamar Dagang Induk Usaha Mikro Kecil Menengah/ KADIN UMKM	Banten
15	Komunitas Aing Sunda Banten	Banten
16	perkumpulan jawara banten santri dan kaum intelektual	Banten
17	Keluarga Kerukunan Tabut Bencoolen disingkat KKT Bencoolen	Bengkulu
18	Bencoolen Al kerbala tradisi	Bengkulu
19	Lembaga Pendidikan Islam	Bengkulu
20	CV Bendera Mataram Raya	DI Yogyakarta
21	Indonesian Plastics Recyclers	DKI Jakarta
22	Gemar Indonesia Jaya	DKI Jakarta
23	Wanita Syarikat Islam	DKI Jakarta
24	Komando Inti Bela Tanah Air (KIBLAT)	Jawa Barat
25	Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII)	Jawa Barat
26	PDNA Garut	Jawa Barat
27	Himpunan Mahasiswa Islam	Jawa Barat
28	Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Sumedang	Jawa Barat

No	Nama Organisasi	Provinsi
29	Toga horti bibase	Jawa Barat
30	Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat (LPTT)	Jawa Barat
31	Paguyuban Putra Daerah PAPDA kota Semarang	Jawa Tengah
32	Komunitas Hidroponik "Tunas Harapan"	Jawa Tengah
33	Mapala MITAPASA	Jawa Tengah
34	Fatayat NU	Jawa Timur
35	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bulungan	Kalimantan Utara
36	Perkumpulan Malayu Minang Batam	Kepulauan Riau
37	Pondok Pesantren Inklusif Tri Bhakti Al-Qudwah	Lampung
38	Sanggar wayang joglo (SAWAJO)	Lampung
39	Dekai Books Yahukimo	Papua
40	Papuansphoto (Karya Anak Papua)	Papua
41	PC. Fatayat NU Bulukumba	Sulawesi Selatan
42	PD. Pemuda Muhammadiyah Bulukumba	Sulawesi Selatan
43	Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Bulukumba	Sulawesi Selatan
44	PEDULIRAKYAT.CO.ID/ PT. PEDULI RAKYAT INDONESIA	Sulawesi Selatan
45	Yayayaan pendidikan Umboh	Sulawesi Selatan
46	Kelompok KB Pria Anuke Simemon Arakan	Sulawesi Utara
47	POSBKUM 'Aisyiyah Sumbar	Sumatera Barat
48	Rumah Baca Anak Desa	Sumatera Utara
49	Taman Bacaan Masyarakat Batambat Satangkahan	Sumatera Utara

Daftar lembaga yang menyatakan diri berafiliasi dengan partai politik

No	Nama Organisasi	Provinsi
1	Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Provinsi Bali	Bali
2	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah	DKI Jakarta
3	Lembaga Bantuan Hukum Pers	DKI Jakarta
4	Gema Nusantara (Gemantara)	Jawa Barat
5	GEMA Nusantara	Lampung
6	Yayasan Merah Putih Sulawesi Tengah (YMP Sulteng)	Sulawesi Tengah

LAMPIRAN 2. DAFTAR NAMA OMS DENGAN GRADE A

No	Nama Organisasi	Provinsi
1	Yayasan Kerti Praja	Bali
2	PKBI Daerah Bali	Bali
3	Yayasan Wisnu	Bali
4	Spirit Paramacitta	Bali
5	Yayasan Gaya Dewata	Bali
6	PPSW Pasoendan Digdaya	Banten
7	PKBI Daerah Bengkulu	Bengkulu
8	Yayasan Kanopi Hijau Indonesia	Bengkulu
9	Yayasan Pusat Pendidikan Dan Pemberdayaan Untuk Perempuan Dan Anak (PUPA)	Bengkulu
10	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu	Bengkulu
11	Perkumpulan LBH Bhakti A.Lumni Unib	Bengkulu
12	Akar Foundation	Bengkulu
13	Perkumpulan IDEA	DI Yogyakarta
14	Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (Samin)	DI Yogyakarta
15	Yayasan Annisa Swasti (Yasanti)	DI Yogyakarta
16	Sigab Indonesia	DI Yogyakarta
17	Yayasan Sheep Indonesia	DI Yogyakarta
18	Yayasan IRE FLAMMA	DI Yogyakarta
19	SAPDA (Sentra Advokasi, Perempuan, Difabel dan Anak)	DI Yogyakarta
20	Perkumpulan Desa Lestari	DI Yogyakarta
21	Lembaga Bantuan Hukum Al Kautsar	DI Yogyakarta
22	Yayasan Vesta Indonesia	DI Yogyakarta
23	Yayasan Rumah Impian Indonesia	DI Yogyakarta
24	Yakkum Emergency Unit	DI Yogyakarta
25	Mitra Wacana	DI Yogyakarta
26	Yayasan Satunama Yogyakarta	DI Yogyakarta
27	Yayasan Intermedika Prana	DKI Jakarta
28	JIP	DKI Jakarta
29	PKBI DKI Jakarta	DKI Jakarta
30	Yayasan Karitas Sani Madani (Karisma)	DKI Jakarta
31	Yayasan Pesona Jakarta	DKI Jakarta
32	Yayasan Kusuma Buana	DKI Jakarta
33	Insitut Kapal Perempuan	DKI Jakarta

No	Nama Organisasi	Provinsi
34	Perkumpulan Huma Indonesia (Huma)	DKI Jakarta
35	Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia /Indonesian Center For Environmental Law	DKI Jakarta
36	Yayasan Sosial Indonesia Untuk Kemanusiaan (Ika) (Ika)	DKI Jakarta
37	Yayasan Kesehatan Perempuan	DKI Jakarta
38	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI)	DKI Jakarta
39	Yayasan Lembaga Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan "INDEF"	DKI Jakarta
40	Yayasan Cahaya Guru	DKI Jakarta
41	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jayakarta	DKI Jakarta
42	Transparency International Indonesia	DKI Jakarta
43	Yayasan LBH Apik Jakarta	DKI Jakarta
44	Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif Dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika)	DKI Jakarta
45	Ppsw Jakarta	DKI Jakarta
46	Konsil LSM Indonesia	DKI Jakarta
47	Yayasan Siklus Sehat Indonesia	DKI Jakarta
48	Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia	DKI Jakarta
49	Federasi Serikat Pekka Indonesia	DKI Jakarta
50	Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia	DKI Jakarta
51	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pusat	DKI Jakarta
52	Yayasan Puan Amal Hayati	DKI Jakarta
53	Yayasan PATTIRO	DKI Jakarta
54	Yappika (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif Dan Kemitraan Masyarakat Indonesia)	DKI Jakarta
55	Ecpat Indonesia	DKI Jakarta
56	Perkumpulan Koalisi Seni Indonesia	DKI Jakarta
57	Wahid Foundation	DKI Jakarta
58	Bina Desa	DKI Jakarta
59	Perkumpulan PRAKARSA	DKI Jakarta
60	Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3M)	DKI Jakarta
61	Pos Bantuan Hukum Aisyiyah Jakarta	DKI Jakarta
62	In-Docs (Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia)	DKI Jakarta
63	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia	DKI Jakarta

No	Nama Organisasi	Provinsi
64	Yayasan Kalyanamitra	DKI Jakarta
65	Pelkesi	DKI Jakarta
66	Yayasan Mitra Aksi	Jambi
67	Komunitas Konseravsi Indonesia Warsi	Jambi
68	Lembaga Penelitian Sosial Dan Agama	Jawa Barat
69	Jaringan Indonesia Positif Jawa Barat	Jawa Barat
70	Female Plus	Jawa Barat
71	PKBI Kota Bandung	Jawa Barat
72	Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia	Jawa Barat
73	Perkumpulan Puzzle Indonesia	Jawa Barat
74	PKBI Sukabumi	Jawa Barat
75	Perkumpulan Inisiatif	Jawa Barat
76	Perkumpulan Rumah Cemara	Jawa Barat
77	Yayasan SAPA	Jawa Barat
78	Yayasan Putra Agung Mandiri	Jawa Barat
79	Perkumpulan Pemberdayaan Dan Pendidikan Konservasi Alam - YAPEKA	Jawa Barat
80	Yayasan Bersama Kita Pulih	Jawa Barat
81	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kota Depok	Jawa Barat
82	Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)	Jawa Barat
83	Yayasan Muara Hati (Bilic)	Jawa Barat
84	Lembaga Penelitian, Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi & Sosial (LP3ES)	Jawa Barat
85	PPSW Pasoendan Digdaya	Jawa Barat
86	Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Kuningan	Jawa Barat
87	Yayasan Wanadri	Jawa Barat
88	Yayasan Sehat Peduli Kasih	Jawa Tengah
89	Persepsi	Jawa Tengah
90	Yayasan LPPSLH	Jawa Tengah
91	Yayasan Gita Pertiwi	Jawa Tengah
92	LKTS - Lembaga Kajian Untuk Transformasi Sosial	Jawa Tengah
93	Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK)	Jawa Tengah
94	Yayasan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan - LPTP	Jawa Tengah
95	Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang	Jawa Tengah

No	Nama Organisasi	Provinsi
96	PKBI Jawa Tengah	Jawa Tengah
97	Yayasan Kepedulian Untuk Anak Surakarta	Jawa Tengah
98	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten	Jawa Tengah
99	Yayasan Sehat Panghuripan Sukowati (Spasi)	Jawa Tengah
100	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Semarang	Jawa Tengah
101	Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan Dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM)	Jawa Tengah
102	Yayasan Kebangsaan Kemanusiaan Indonesia (YSKKI)	Jawa Timur
103	Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan Dan Pembangunan Jawa Timur	Jawa Timur
104	Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur	Jawa Timur
105	Koalisi Perempuan Ronggolawe	Jawa Timur
106	Tanoker	Jawa Timur
107	PKBI Daerah Jawa Timur	Jawa Timur
108	Yayasan Redline Indonesia	Jawa Timur
109	KPS2K Jatim	Jawa Timur
110	Yayasan Geratak Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat
111	Sintang Freshwater Care	Kalimantan Barat
112	Aliansi Perempuan Kalimantan Untuk Perdamaian Dan Keadilan Gender (Alpekaje)	Kalimantan Barat
113	Perkumpulan Gemawan	Kalimantan Barat
114	PKBI Daerah Kalbar	Kalimantan Barat
115	Institut Menua Punjung	Kalimantan Barat
116	Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa	Kalimantan Barat
117	Bentang Kalimantan Tangguh	Kalimantan Barat
118	Alam Sehat Lestari (Asri)	Kalimantan Barat
119	Lembaga Bantuan Hukum Intan	Kalimantan Selatan
120	PKBI Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
121	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH)	Kalimantan Timur
122	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
123	Menapak Indonesia	Kalimantan Timur
124	Yayasan Kawal Borneo	Kalimantan Timur
125	Perkumpulan Padi Indonesia	Kalimantan Timur

No	Nama Organisasi	Provinsi
126	Perkumpulan Peduli Lingkungan (Perdu Kal-Tara)	Kalimantan Utara
127	Komunitas Konservasi Indonesia - Warsi	Kalimantan Utara
128	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
129	Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam	Kepulauan Riau
130	Yayasan Lintas Nusa	Kepulauan Riau
131	Perkumpulan DAMAR	Lampung
132	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Lampung	Lampung
133	Yayasan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fiat Yustisia (YLKBH Fiat Yustisia)	Lampung
134	Jpic - Fsgm Indonesia	Lampung
135	Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS)	Lampung
136	Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung	Lampung
137	Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Provinsi Maluku	Maluku
138	Perkumpulan Rumah Flower Aceh	NAD
139	Koalisi Ngo Ham Aceh	NAD
140	Sahara Aceh	NAD
141	Lombok Research Center (LRC)	NTB
142	Solidaritas Demokrasi Sembilan Sembilan	NTB
143	Lembaga Studi Partisipasi Ekonomi Dan Demokrasi Mitra Samya	NTB
144	Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Ntb (LPA NTB)	NTB
145	Konsepsi Ntb	NTB
146	Perkumpulan Panca Karsa (PPK)	NTB
147	Gema Alam Ntb	NTB
148	Yayasan Amnaut Bife"Kuan" Nusa Tenggara Timur/Yabiku Ntt	NTT
149	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	NTT
150	Perkumpulan Pengembangan Inisiatip Dan Advokasi Rakyat (PIAR-NTT)	NTT
151	Yayasan Kesehatan Untuk Semua (YKS)	NTT
152	Yayasan Pelita Husada Flobamora Kupang	NTT
153	Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Papua	Papua
154	Yayasan Cendrawasih Bersatu Papua	Papua
155	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Papua (PKBI Papua)	Papua

No	Nama Organisasi	Provinsi
156	Yayasan Anak Dusun Papua (Yadupa)	Papua
157	Yayasan Sorong Sehati	Papua Barat
158	Yayasan Tifa Mandiri	Papua Barat
159	Perkumpulan Bentang Nusantara (Bentara) Papua	Papua Barat
160	Yayasan Utama Riau	Riau
161	Perkumpulan Scale Up	Riau
162	Kartini Manakarra	Sulawesi Barat
163	Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
164	Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak)	Sulawesi Barat
165	PKBI Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
166	Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulsel	Sulawesi Selatan
167	Yasmib Sulawesi	Sulawesi Selatan
168	Kahayya Center Researc	Sulawesi Selatan
169	Lembaga Bina Lingkungan Indonesia (Bingkai) Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
170	Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia	Sulawesi Selatan
171	Lembaga Advokasi Dan Pendidikan Anak Rkayat (LAPAR) Sulsel	Sulawesi Selatan
172	Pattiro Jeka	Sulawesi Selatan
173	Yayasan Gaya Celebes (Ygc) Makassar	Sulawesi Selatan
174	Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Dan Masyarakat (YLP2EM)	Sulawesi Selatan
175	Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya	Sulawesi Selatan
176	Pos Bantuan Hukum Pranaja Sul Sel	Sulawesi Selatan
177	Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Kuoami	Sulawesi Tengah
178	Institut Mosintuwu	Sulawesi Tengah
179	Evergreen Indonesia	Sulawesi Tengah
180	Pbhr Sulteng	Sulawesi Tengah
181	Yay. Rumpun Perempuan Sultra (Rps)	Sulawesi Tenggara
182	PKBI Daerah Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
183	Lembaga Pengkajian Dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Sumbar	Sumatera Barat
184	PKBI Sumatera Barat	Sumatera Barat
185	Erik Sepria Esa	Sumatera Barat
186	Yayasan Intan Maharani	Sumatera Selatan
187	Perkumpulan Hutan Kita Institute (Haki)	Sumatera Selatan

No	Nama Organisasi	Provinsi
188	Ipwl Yayasan Cahaya Putra Selatan	Sumatera Selatan
189	Yayasan Kharisma Sumsel	Sumatera Selatan
190	Yayasan LBH Apik Sumsel	Sumatera Selatan
191	Yayasan Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA)	Sumatera Utara
192	Perhimpunan Lembaga Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU)	Sumatera Utara
193	Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada)	Sumatera Utara
194	Obh Yesaya 56 Medan	Sumatera Utara
195	Posbakumadin Medan	Sumatera Utara
196	Lembaga Bantuan Hukum Trisila Sumatera Utara	Sumatera Utara
197	Yayasan Pusaka Indonesia	Sumatera Utara
198	LBH Menara Keadilan	Sumatera Utara
199	Yayasan Bitra Indonesia	Sumatera Utara
200	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Utara	Sumatera Utara
201	Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kantor Cabang Nias	Sumatera Utara

LAMPIRAN 3. DAFTAR NAMA OMS DENGAN GRADE B

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
1	Yayasan Kasih Pelangi Dewata (Kapelata)	Bali
2	Perkumpulan Kelompok Peduli Perempuan Dan Anak (PKPPA)	Bali
3	LBH Apik Bali	Bali
4	Yayasan Bali Peduli	Bali
5	PBH Peradi Denpasar	Bali
6	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Belitung	Bangka Belitung
7	Milenial Bangka Tengah Keadilan	Bangka Belitung
8	Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)	Bangka Belitung
9	Yay Nur Dewi Lestari	Bangka Belitung
10	Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (Elpdkp)	Bangka Belitung
11	Demokrasi.Id (Yayasan Demokrasi Indonesia Damai)	Banten
12	Forum Peduli Kesehatan Ibu Dan Anak (FOPKIA) Kabupaten Tangerang	Banten
13	Fopkia Serang	Banten
14	Bapera	Banten
15	Yayasan Pusat Studi Dan Informasi Regional Banten	Banten
16	Lsm Gnri Dpw Banten	Banten
17	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Banten	Banten
18	Yayasan Wana Wani Wauh	Banten
19	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara	Banten
20	Advokasi Inklusi Disabilitas (Audisi) Foundation	Banten
21	Nalar Pandeglang	Banten
22	Mufti Rahman & Rekan Lawfirm	Banten
23	Rehabilitasi Konservasi Bhumi (Rekonvasi Bhumi)	Banten
24	LSM-LBH Kampak Mas-Ri	Banten
25	Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening	Banten

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
26	Yayasan Lingkar Studi Desa	Banten
27	YBH.Mutiara Indah	Banten
28	Yayasan Guriang Tujuh Indonesia	Banten
29	Yayasan Sobat Peduli	Banten
30	L KPK Panri	Banten
31	Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara	Banten
32	Kompak Lebak Banten	Banten
33	Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil	Bengkulu
34	Yayasan Cahaya Perempuan	Bengkulu
35	Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Aisyiyah	Bengkulu
36	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan	Bengkulu
37	Lembaga Kajian Islam Dan Sosial	DI Yogyakarta
38	Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY	DI Yogyakarta
39	Penabulu Cabang Yogyakarta	DI Yogyakarta
40	Trade Union Rights Centre	DKI Jakarta
41	Asosiasi PPSW	DKI Jakarta
42	Yayasan Anak Dan Perempuan	DKI Jakarta
43	Yayasan Mitra Masyarakat Sehat Indonesia (CCPHI)	DKI Jakarta
44	Yayasan Skala Indonesia	DKI Jakarta
45	Yayasan Bina Swadaya	DKI Jakarta
46	LBH Jakarta Justice	DKI Jakarta
47	Jaringan Lsm Penanggulangan Pekerja Anak Indonesia (Jarak-Indonesia)	DKI Jakarta
48	IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia)	DKI Jakarta
49	Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (Asppuk)	DKI Jakarta
50	Yayasan Perludem	DKI Jakarta
51	Yayasan Srikandi Sejati	DKI Jakarta
52	Bantuan Hukum Geradin Pimpinan Pusat	DKI Jakarta

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
53	Perkumpulan Aneka Yuwana Forum	DKI Jakarta
54	Yayasan Prasasti Perdamaian (Ypp)	DKI Jakarta
55	Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Paham) Indonesia	DKI Jakarta
56	Perkumpulan Amerta	DKI Jakarta
57	Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia	DKI Jakarta
58	The Smeru Research Institute	DKI Jakarta
59	Lembaga Kelautan Dan Perikanan Indonesia	DKI Jakarta
60	Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel (Rbh-Rg)	Gorontalo
61	Lembaga Konsultasu & Bantuan Hukum Universitas Ichsan	Gorontalo
62	Pusat Kajian Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Provinsi Gorontalo	Gorontalo
63	Aliansi Perempuan Merangin (APM)	Jambi
64	LBH Jambi	Jambi
65	Inisiatif Aksi Sosial Dan Konservasi (INISIASI)	Jambi
66	Gerakan Cinta Desa	Jambi
67	Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan	Jambi
68	Yayasan Keadilan Rakyat (YKR)	Jambi
69	Posbakumadin Kota Sungai Penuh	Jambi
70	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Jawa Barat	Jawa Barat
71	Pergerakan Relawan Kemanusiaan Dan Lingkungan Indonesia	Jawa Barat
72	Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA)	Jawa Barat
73	Next Generation (NXG) Indonesia	Jawa Barat
74	Umah Ramah	Jawa Barat
75	Yayasan Lembaga Bantuan Dan Konsultasi Hukum (LBKH) Pelita Justitia	Jawa Barat
76	Jatidiri	Jawa Barat
77	Yayasan Terang Anak Indonesia / Yateri	Jawa Barat

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
78	Yayasan Lensa Bhineka Nusantara	Jawa Barat
79	Mitra Relawan Medika (Trradika)	Jawa Barat
80	UADS (Urban Alternatif Developmen Strategi)	Jawa Barat
81	Yayasan Komunitas Arus Langit	Jawa Barat
82	Balqis	Jawa Barat
83	Pusat Studi Dan Pengembangan Perdamaian (PSPP) Nawang Wulan - JAKATARUB	Jawa Barat
84	Fahmina Institute	Jawa Barat
85	Perkumpulan Advokasi Hukum Indonesia	Jawa Barat
86	Gemantara	Jawa Barat
87	Gema Nusantara	Jawa Barat
88	Koalisi Perempuan Indonesia	Jawa Barat
89	Gres Institute	Jawa Barat
90	Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia	Jawa Barat
91	Badan Sosial Lintas Agama	Jawa Barat
92	Laskar Merah Merah Putih Perjuangan (LMPP)	Jawa Barat
93	Yayasan Metamorfosis Menuju Inklusi	Jawa Barat
94	Pirac	Jawa Barat
95	Yayasan Biruku Indonesia	Jawa Barat
96	Yayasan Nindya Miesye Agita (Bullyid Indonesia)	Jawa Barat
97	Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Tengah	Jawa Tengah
98	Yayasan Kalandara	Jawa Tengah
99	Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Semarang	Jawa Tengah
100	Badan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	Jawa Tengah
101	LBH Saiful Abib	Jawa Tengah
102	LBH Themis	Jawa Tengah
103	Mangrove Institut Komangjo Foundation	Jawa Tengah
104	LKBHI IAIN Salatiga	Jawa Tengah

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
105	Lembaga Advokasi Bumi	Jawa Tengah
106	Lembaga Pemberdayaan Perempuan (Lpp) Sekar Jeparo	Jawa Tengah
107	PPRBM Solo	Jawa Tengah
108	Mentari Sehat Indonesia	Jawa Tengah
109	Pattiro Semarang	Jawa Tengah
110	LBH Fiat Justitia	Jawa Tengah
111	Lembaga Ppap Seroja	Jawa Tengah
112	Perkumpulan KOMPIP	Jawa Tengah
113	Sammi Institut	Jawa Tengah
114	Eska Unggul Indonesia	Jawa Tengah
115	Legal Resources Center Untuk Keadilan Jender Dan HAM/ LRC-KJHAM	Jawa Tengah
116	Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (Ops) Jawa Timur	Jawa Timur
117	Yayasan Syarikat Masyarakat Mandiri (Srikandi)	Jawa Timur
118	KOPPATARA (Komunitas Pelindungan Perempuan Dan Anak Nusantara)	Jawa Timur
119	Kpuk (Koalisi Perempuan Untuk Kepemimpinan)	Jawa Timur
120	Ruang Mitra Perempuan (Rumpun)	Jawa Timur
121	Perkumpulan Gerakan Peduli Perempuan	Jawa Timur
122	Yayasan Paramitra	Jawa Timur
123	Lsm Gemuruh	Jawa Timur
124	Surabaya Children Crisis Center (SCCC)	Jawa Timur
125	Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM)	Jawa Timur
126	Perkumpulan Rumah Keadilan	Jawa Timur
127	Sanggar Hijau Indonesia	Jawa Timur
128	Lsm Duta Corruption Watch	Jawa Timur
129	Profauna Indonesia Lestari	Jawa Timur
130	LBH Jentera Perempuan Indonesia	Jawa Timur
131	Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya	Jawa Timur

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
132	Yayasan Sadar Hati	Jawa Timur
133	Yayasan Pattiro Gresik	Jawa Timur
134	Aliansi Perempuan Lamongan	Jawa Timur
135	Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Jember	Jawa Timur
136	Sahabat Perempuan Anak (Sapuan)	Jawa Timur
137	Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera (Yabhysa)	Jawa Timur
138	Plato Foundation	Jawa Timur
139	Koalisi Perempuan Indonesia	Jawa Timur
140	Yayasan Studi Kebijakan Dan Transformasi Sosial	Jawa Timur
141	Idfos Indonesia	Jawa Timur
142	Yayasan Pelestari Ragam Hayati Dan Cipta Fondasi Indonesia / Yayasan PRCF Indonesia	Kalimantan Barat
143	LBH Bhakti Nusa	Kalimantan Barat
144	Institut Studi Pengembangan Masyarakat	Kalimantan Barat
145	Yayasan Sosial Solidaritas Nusantara	Kalimantan Barat
146	Buruh Migran Assambasy	Kalimantan Barat
147	Yayasan Riak Bumi Indonesia	Kalimantan Barat
148	Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan (Gapemasda)	Kalimantan Barat
149	Mempawah Mangrove Conservation	Kalimantan Barat
150	Lembaga Pemberdayaan Gerakan Rakyat Elpagar	Kalimantan Barat
151	Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bersatu Ketapang	Kalimantan Barat
152	Yayasan Dian Tama Pontianak	Kalimantan Barat
153	Yayasan Palung	Kalimantan Barat
154	Yayasan Bantuan Hukum Sipakatuo	Kalimantan Selatan
155	Yayasan Rahim Bumi	Kalimantan Selatan
156	Siti Sarah Women Center	Kalimantan Selatan
157	Alba	Kalimantan Selatan

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
158	Lembaga Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Elpam)	Kalimantan Tengah
159	Lsm Lentera Kartini	Kalimantan Tengah
160	Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito	Kalimantan Tengah
161	Perkumpulan Nurani Perempuan	Kalimantan Timur
162	Yayasan Bikal Karya Lestari	Kalimantan Timur
163	Pokja 30	Kalimantan Timur
164	Green Of Borneo	Kalimantan Utara
165	Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL)	Kalimantan Utara
166	Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia	Kepulauan Riau
167	Yayasan Rumah Rehabilitasi Sosial Sahabat Anak Indonesia	Kepulauan Riau
168	Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat	Lampung
169	Lembaga Bantuan Hukum Nasional	Lampung
170	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lampung Tengah	Lampung
171	Institut Tifa Damai Maluku	Maluku
172	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku	Maluku
173	PD AMAN Kepulauan Aru (AMAN Aru)	Maluku
174	Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM) Maluku	Maluku
175	Yayasan Rang Tuntunan	Maluku
176	Yayasan Pelangi Maluku	Maluku
177	Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon	Maluku
178	Lembaga Bantuan Hukum Dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Maluku
179	YLBH Walima Sula	Maluku Utara
180	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara	Maluku Utara
181	Posbakumadin Kota Tidore	Maluku Utara
182	Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara	Maluku Utara
183	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara	Maluku Utara

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
184	Gerak Aceh	NAD
185	Yayasan Katahati Aceh	NAD
186	Forum Lsm Aceh	NAD
187	Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa	NAD
188	Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh	NAD
189	Lkbh Sata Alfaqih	NAD
190	Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh	NAD
191	Restorative Justice Working Group	NAD
192	Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan & Masyarakat	NAD
193	Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK) Aceh	NAD
194	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Takengon (Posbakumadin Takengon)	NAD
195	LBH Trisila Lhokseumawe Aceh	NAD
196	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Samawa	NTB
197	Yayasan Galang Anak Semesta (Gagas)	NTB
198	Pbh Kawal Keadilan	NTB
199	Yayasan Yisa Ambalawi Mbojo	NTB
200	Perkumpulan Yaksa Lambung Kemanusiaan Masyarakat Pedesaan (P YLKMP)	NTB
201	Lembaga Bantuan Hukum Pelangi Mataram	NTB
202	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Ntb	NTB
203	Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM)	NTB
204	Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia	NTB
205	Perkumpulan Solusi Anak Bangsa (Sobat)	NTB
206	Yayasan Inspirasi NTB	NTB
207	LBHAPIK NTB	NTB
208	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia	NTB
209	LKS - LPEP Lentera Mbojo	NTB

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
210	Perkumpulan "Bengkel" Advokasi Pemberdayaan Dan Pengembangan Kampung (Appek) NTT	NTT
211	Yayasan Permata Bunda Berbelas Kasih	NTT
212	LBH Manggarai Raya	NTT
213	Yayasan Alfa Omega	NTT
214	Yayasan Tapen Bikomi	NTT
215	Yayasan Wali Ati (Yasalti)	NTT
216	Perkumpulan Relawan Cis Timor	NTT
217	Yayasan Sanggar Suara Perempuan Soe	NTT
218	Yayasan Koordinasi Pengkajian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Yayasan KOPPESDA)	NTT
219	Yayadan Timor Membangun	NTT
220	Yayasan Kajian Dan Bantuan Hukum Sarnelli (Kantor Bantuan Hukum Sarnelli)	NTT
221	LBH Papua Justice & Peace	Papua
222	Lp3a-Papua	Papua
223	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kamasan	Papua Barat
224	Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan Dan Perdamaian	Papua Barat
225	Yayasan Mitra Husada Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
226	Perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Celebes Area (Wallacea)	Sulawesi Selatan
227	Yayasan Bantuan Hukum Komunitas Masyarakat Pemerhati Anti Korupsi Indonesia (Ybk Kompak Indonesia)	Sulawesi Selatan
228	Perkumpulan KATALIS	Sulawesi Selatan
229	Yayasan Bantuan Hukum Kompak Indonesia	Sulawesi Selatan
230	Ppo Daun Hijau	Sulawesi Selatan
231	Lembaga Demokrasi Celebes	Sulawesi Selatan
232	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Soppeng	Sulawesi Selatan
233	Lembaga Maritim Nusantara	Sulawesi Selatan

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
234	Jenewa Madani Indonesia	Sulawesi Selatan
235	Pilar Nusantara (Pinus) Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
236	Yayasan Gerak Bersama Indonesia	Sulawesi Selatan
237	Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia - Kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHI-LBH Makassar)	Sulawesi Selatan
238	Laskar Anti Korupsi Indonesia Laki	Sulawesi Selatan
239	Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
240	Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kestaraan	Sulawesi Selatan
241	Lsm Harimau Indonesia Bersayap (Hib)	Sulawesi Selatan
242	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Laperma) Sinjai	Sulawesi Selatan
243	Yayasan Maupe Maros	Sulawesi Selatan
244	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (YLBH-Bk)	Sulawesi Selatan
245	Posbakumadin Bulukumba	Sulawesi Selatan
246	Yayasan Sikola Mombine	Sulawesi Tengah
247	Yayasan Tanah Merdeka	Sulawesi Tengah
248	Perkumpulan Relawan Orang Dan Alam (ROA)	Sulawesi Tengah
249	Komunitas Celebes Bergerak	Sulawesi Tengah
250	Libu Perempuan	Sulawesi Tengah
251	Posbakumadin Touna	Sulawesi Tengah
252	Lembaga Bantuan Hukum Harapan Rakyat Sulteng	Sulawesi Tengah
253	YLBH Apik Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
254	Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
255	Laskar Anti Korupsi Indonesia	Sulawesi Tenggara
256	Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
257	Lembaga Bantuan Hukum Kendari	Sulawesi Tenggara
258	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
259	LBH Bakti Keadilan Nusantara	Sulawesi Tenggara

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
260	Swara Parangpuan Sulut	Sulawesi Utara
261	Yayasan Cahaya Mercusuar Indonesia	Sulawesi Utara
262	Yayasan Pelita Kasih Abadi Manado	Sulawesi Utara
263	Yayasan Suara Nurani Minaesa	Sulawesi Utara
264	Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia Batusangkar	Sumatera Barat
265	Perkumpulan Masyarakat Sehat Sriwijaya	Sumatera Selatan
266	LBH Sumel	Sumatera Selatan
267	Lembaga Bantuan Hukum Lahat	Sumatera Selatan
268	Perkumpulan Nipah Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
269	YLBHI Lembaga Bantuan Hukum Palembang	Sumatera Selatan
270	Yayasan Galatea	Sumatera Utara
271	Sempurna Community	Sumatera Utara
272	Bbha Indikator	Sumatera Utara
273	Laskar Anti Korupsi Indonesia (Laki)	Sumatera Utara
274	DPC Laki (Laskar Anti Korupsi Indonesia)	Sumatera Utara
275	LBH Apik Medan	Sumatera Utara
276	Yayasan Medan Plus	Sumatera Utara
277	Sumatra Rainforest Institute/Lembaga Hutan Hujan Sumatera	Sumatera Utara
278	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-Cni)	Sumatera Utara
279	Yayasan Kksp (Kelompok Kerja Sosial Perkotaan)	Sumatera Utara
280	Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (Yafsi)	Sumatera Utara
281	Yayasan Penguatan Rakyat Pedesaan (Paras)	Sumatera Utara
282	Yayasan Mentari Meraki Asa	Sumatera Utara
283	Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56	Sumatera Utara
284	Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Tebingtinggi	Sumatera Utara
285	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas	Sumatera Utara

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
286	Lembaga Bantuan Hukum Dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH&Pham Indonesia Bonum Communae)	Sumatera Utara
287	Yayasan Ar-Rasyid Ruhul Islam	Sumatera Utara
288	Obh Yesaya 56 Samosir	Sumatera Utara
289	Hapsari (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia)	Sumatera Utara
290	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHi Masmada Labusel)	Sumatera Utara
291	Perkumpulan Sumut Watch	Sumatera Utara
292	Aliansi Sumut Bersatu	Sumatera Utara
293	Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri	Sumatera Utara
294	Posbakumadin Madina	Sumatera Utara
295	Posbakumadin Padang Lawas	Sumatera Utara

LAMPIRAN 4. DAFTAR NAMA OMS DENGAN GRADE C

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
1	Yayasan Kesehatan Bali	Bali
2	Bali Sruti	Bali
3	Jip bali	Bali
4	IPPI	Bali
5	LSM GERAKAN MUDA PEDULI ASPIRASI RAKYAT	Bangka Belitung
6	PERKUMPULAN PERANGKAP	Banten
7	Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih (LPKMP)	Banten
8	Gerakan Membangun Masyarakat (GEMMA BANTEN)	Banten
9	PSM gemma Banten	Banten
10	Yayasan Biodinamika Pertanian dan Bahari Indonesia	Banten
11	Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)	Banten
12	Hazanah Keberdayaan Holistik (ASKETIK)	Banten
13	Tunas Banten Pratama (TBP)	Banten
14	YAYAASAN INISAITIF KEBUDAYAAN INDONESIA	Banten
15	Tangerang public Transparency Watch	Banten
16	Cakra Wikara Indonesia (CWI)	DKI Jakarta
17	Yayasan Setia Kawan Raharja (SEKAR)	DKI Jakarta
18	Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia	DKI Jakarta
19	Pusat Bantuan Hukum Universitas	DKI Jakarta
20	Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Anzor	DKI Jakarta
21	IPPI	DKI Jakarta
22	Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia (AWCPH UI)	DKI Jakarta
23	Lembaga Indeks	DKI Jakarta
24	Pusat Kajian Parlemen Indonesia	DKI Jakarta
25	LSM Lingkar Pemuda Gorontalo (LSM LPGO)	Gorontalo
26	Perkumpulan Biodiversitas Gorontalo (BIOTA)	Gorontalo

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
27	Paguyuban peduli kebijakan napza parahyangan	Jawa Barat
28	Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera (Grapiks)	Jawa Barat
29	ALIANSI SRIKANDI PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK (ASPPA)	Jawa Barat
30	Inti Muda Jawa Barat	Jawa Barat
31	Jaringan Kearifan Tradisional Indonesia (JKTI)	Jawa Barat
32	Yayasan Akses Indonesia	Jawa Barat
33	Perkumpulan Inti Muda Indonesia	Jawa Barat
34	Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPC PPDI) Kota Cirebon	Jawa Barat
35	Odesa Indonesia	Jawa Barat
36	Yayasan Saba Desa	Jawa Barat
37	Yayasan Sumberdaya Mitra	Jawa Barat
38	Yayasan Lentera Anak	Jawa Barat
39	Yayasan Restorasi Indonesia Baru	Jawa Barat
40	Perkumpulan Suara Kita	Jawa Barat
41	FITRA Jawa Barat	Jawa Barat
42	Yayasan Jaringan Equals Indonesia	Jawa Barat
43	Yayasan Pamanah Rasa Nusantara	Jawa Barat
44	Perkumpulan Absolute Halimun Indonesia (Absolute Indonesia)	Jawa Barat
45	Forum Pengada Layanan (FPL)	Jawa Barat
46	Perhimpunan Perempuan Penyuluh Sebaya (P3S)	Jawa Barat
47	PBH PERADI CIKARANG	Jawa Barat
48	yayasan Bale Urang Sarerea	Jawa Barat
49	LPP Kinasih Blora	Jawa Tengah
50	Upipa gow wonosobo	Jawa Tengah
51	Lembaga Abdi Umat (LAU)	Jawa Tengah
52	Wpa bandarharjo	Jawa Tengah
53	Paguyuban Penggiat Lingkungan ASRI Wonosobo	Jawa Tengah

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
54	Rumah motivasi shamany	Jawa Tengah
55	CDC - Yayasan Bina Karya Sosial	Jawa Tengah
56	Yayasan Perwaris Satu Hati	Jawa Tengah
57	FORUM MASYARAKAT MADANI KESEHATAN IBU DAN ANAK (FMM KIA)	Jawa Tengah
58	SUPHEL (Solidaritas Masyarakat untuk Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup)	Jawa Tengah
59	Perkumpulan Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)	Jawa Timur
60	KomPPAs	Jawa Timur
61	Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa	Jawa Timur
62	Suara Difabel Mandiri	Jawa Timur
63	Lembaga Pengembangan Perempuan Desa (LP2D)	Jawa Timur
64	PENGALASAN SONGO INDONESIA	Jawa Timur
65	LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA	Kalimantan Barat
66	Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan	Kalimantan Barat
67	Global Geografi Indonesia (GRID)	Kalimantan Barat
68	PKBI Kota Singkawang	Kalimantan Barat
69	Lembaga Pengkajian Study Arus Informasi Regional (LPS AIR)	Kalimantan Barat
70	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara	Kalimantan Barat
71	PPSW Borneo	Kalimantan Barat
72	Komunitas Jagat Pramudita (KJP)	Kalimantan Barat
73	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia	Kalimantan Barat
74	Yayasan Pusat Mangrove (Mangrove Center Foundation) -MCF	Kalimantan Barat
75	Forum PUSPA	Kalimantan Selatan
76	Lembaga Swadaya Masyarakat BPK Marpelt	Kalimantan Selatan
77	Kalimantan Huma Hijau Institute (KH2 institute)	Kalimantan Tengah
78	Yayasan Petak Danum	Kalimantan Tengah

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
79	MP3i	Kalimantan Timur
80	Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPD PPD) Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
81	Lembaga Bantuan Hukum AL-MA'THUR	Kalimantan Timur
82	Yayasan Ulin	Kalimantan Timur
83	Yayasan Pelestari Lingkungan Hijau Kalimantan Utara	Kalimantan Utara
84	Pusat Kajian Masyarakat Perbatasan Kalimantan Utara (PIKIR KALTARA)	Kalimantan Utara
85	Yayasan Kaseh Puan Karimun	Kepulauan Riau
86	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMPUNG BARAT	Lampung
87	Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad	Lampung
88	pusat study strategi dan kebijakan	Lampung
89	Yayasan Peduli INAYANA Maluku	Maluku
90	LAPPAN Malulu	Maluku
91	JEJAK PEMUDA PETUALANG	Maluku
92	Yayasan Daulat Perempuan Maluku Utara	Maluku Utara
93	YAYASAN SINAR DESA INDONESIA (YASINDO)	NAD
94	Yayasan Bantuan Hukum Anak Peutuah Mandiri Aceh	NAD
95	PERKUMPULAN LBH APIK Aceh	NAD
96	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Aceh	NAD
97	Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)	NAD
98	YAYASAN RUMPUN BAMBU INDONESIA ACEH	NAD
99	Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah NTB (KPI NTB)	NTB
100	Perkumpulan FITRA Nusa Tenggara Barat (FITRA NTB)	NTB
101	Lembaga Pengembangan Sumberdaya Nelayan (LPSDN)	NTB
102	Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Rote Ndao	NTT
103	YAYASAN KUAN MNASI	NTT

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
104	Lembaga Pengembangan Masyarakat Lembata (BARAKAT)	NTT
105	Yayasan Bina Desa Mandiri	NTT
106	Yayasan Aletheia	NTT
107	Lembaga swadaya masyarakat peduli perempuan dan Anak Lembata (LSM Permata)	NTT
108	Yayasan Humi inane.artinya: (suara perempuan)	Papua
109	Ikatan Perempuan Positif Indonesia	Papua Barat
110	Ikatan Waria Sorong Raya (IWASOR)	Papua Barat
111	Yayasan Papua Lestari	Papua Barat
112	Perkumpulan Pengembangan Masyarakat dan Konservasi Sumber Daya Alam (PERDU)	Papua Barat
113	CBO ARMADA	Papua Barat
114	PIONER TANAH PAPUA	Papua Barat
115	opsi sorong	Papua Barat
116	Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat (BELANTARA) Papua.	Papua Barat
117	Yayasan Sikap Tulus Untuk Sesama (SIKLUS)	Riau
118	Bunga Bangsa	Riau
119	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Riau (PKBI Daerah Riau)	Riau
120	Riau Women Working Group (RWWG)	Riau
121	Kantor Bantuan Hukum Riau	Riau
122	Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia Sulawesi Barat (LBH-CJ SULBAR)	Sulawesi Barat
123	Jaringan Indonesia Positif (JIP Sul-Sel)	Sulawesi Selatan
124	Lembaga Persaudaraan Korban Napza Makassar (LPKNM)	Sulawesi Selatan
125	Lembaga Mitra Swadaya Mandiri	Sulawesi Selatan
126	Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
127	Inti Muda Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
128	Yayasan Bumi Sawerigading	Sulawesi Selatan
129	Sulawesi Corruption Watch (SCW)	Sulawesi Selatan
130	KDS Saribattangku	Sulawesi Selatan
131	Lembaga Swara Lingkungan	Sulawesi Selatan
132	HWDI Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
133	Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa)	Sulawesi Selatan
134	Lembaga Riset dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Sulawesi Selatan
135	LSM Pasir Putih	Sulawesi Selatan
136	Lembaga Pemerhati Perempuan Marginal	Sulawesi Selatan
137	Yayasan Lbh Makssar	Sulawesi Selatan
138	Forum Komunikasi Pemuda dan Pelajar Bulukumba (FKPP B)	Sulawesi Selatan
139	Komunitas Peduli perempuan dan Anak (KPPA) Sulteng	Sulawesi Tengah
140	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH - DONGGALA)	Sulawesi Tengah
141	LSM GEMPUR POSO	Sulawesi Tengah
142	Yayasan Bonebula	Sulawesi Tengah
143	Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS)	Sulawesi Tengah
144	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Piso Tentena	Sulawesi Tengah
145	LSM Komnas Desa-SULTRA	Sulawesi Tenggara
146	Yayasan Lambuina	Sulawesi Tenggara
147	GAMAL Sultra	Sulawesi Tenggara
148	Lembaga Keprihatinan Manusia dan Lingkungan (GAMAL Sultra)	Sulawesi Tenggara
149	Konsorsium Ekologi dan Ekonomi Kerakyatan Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
150	PUSAT INFORMASI SAMPIRI (PIS)	Sulawesi Utara
151	DPC Gerkatina Kota Padang	Sumatera Barat
152	DPD Gerkatina Sumatera Barat	Sumatera Barat

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
153	Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Sumber Daya (P3SD)	Sumatera Barat
154	Nurani Perempuan WCC	Sumatera Barat
155	Sekolah Gender	Sumatera Barat
156	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Barat	Sumatera Barat
157	Komite Pemuda Mahasiswa Untuk Demokrasi	Sumatera Selatan
158	Lembaga Budaya Komunitas Batanghari Sembilan (disingkat KOBAR 9)	Sumatera Selatan
159	Yayasan Sriwijaya Plus	Sumatera Selatan
160	Yayasan Kuala Merdeka	Sumatera Selatan
161	Women's Crisis Centre (WCC) Palembang	Sumatera Selatan
162	SPORA Research Center (SPORA Institute)	Sumatera Selatan
163	Tanjungbalai Children Community Foundation	Sumatera Utara
164	Yayasan SP2S	Sumatera Utara
165	Solidaritas Generasi Cerdas (SGC)	Sumatera Utara
166	Lembaga Bantuan Hukum Medan	Sumatera Utara
167	LBH PILAR ADVOKASI RAKYAT SUMUT	Sumatera Utara
168	Yayasan Hutan Rakyat Indonesia	Sumatera Utara
169	Yayasan GEMMA	Sumatera Utara
170	Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK)	Sumatera Utara
171	Yayasan Pekat Indonesia	Sumatera Utara
172	Lembaga Burangir	Sumatera Utara
173	Serikat Perempuan Indonesia (SPI) Labuhan Batu	Sumatera Utara

LAMPIRAN 5. DAFTAR NAMA OMS DENGAN GRADE D

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
1	Inti muda bali	Bali
2	LSM. Gempur, Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara	Bangka Belitung
3	Yayasan Bantuan Hukum Dan Pendidikan (BAKUMDIK) BANTEN	Banten
4	Yayasan Banten Peduli Umat	Banten
5	Daya Muda Membangun	Banten
6	Lingkar Studi Feminis	Banten
7	Youth Skills Foundation	DKI Jakarta
8	Lestari Mangrove dan Alam (LEVA)	DKI Jakarta
9	LBH Mawar Saron Jakarta	DKI Jakarta
10	Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender	DKI Jakarta
11	Yayasan Payu Limo Totalu	Gorontalo
12	Agraria Institute Gorontalo	Gorontalo
13	Etalase Ekosistem Indonesia	Jambi
14	Conservation and community empowerment	Jambi
15	Yayasan Imah Indung Bandung	Jawa Barat
16	Perkumpulan Indonesia Kompeten Sinergi	Jawa Barat
17	Yayasan Akses Sehat Indonesia	Jawa Barat
18	Mutti Cahaya Bumi	Jawa Barat
19	Iris Collective	Jawa Tengah
20	Gaya Semarang	Jawa Tengah
21	Masyarakat Peduli Disabilitas Wonosobo (MPDW)	Jawa Tengah
22	Lamongan Teduh	Jawa Timur
23	Lembaga Teraju Indonesia	Kalimantan Barat
24	Yayasan Milenial Kalimantan Utara	Kalimantan Utara
25	Penabulu Cabang Kaltara	Kalimantan Utara
26	Agora Research Center	Kalimantan Utara

No	Nama Organisasi/Lembaga	Provinsi
27	Lembaga Pemerhati Hak Perempuan Dan Anak (LPHPA)	Lampung
28	Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta	Lampung
29	PPSW Aceh	NAD
30	Ludung Weru	NTT
31	PPSW Riau	Riau
32	Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
33	Yayasan Pengembangan dan Pembinaan Masyarakat (YAPPERMI)	Sulawesi Selatan
34	Bumi Nepo	Sulawesi Selatan
35	Yayasan Sekolah Rakyat Petani Payopayo	Sulawesi Selatan
36	Yayasan Peduli Kemandirian Masyarakat (YAPEMMAS)	Sumatera Utara
37	Abadi ikhlas sejahtera indonesia (aksi baik)	Sumatera Utara
38	LBH MAIN	Sumatera Utara
39	LSM P2 Napas Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas Aman	Sumatera Utara
40	Yayasan Kesejahteraan Anak Pesisir Indonesia (YKAPI)	Sumatera Utara



LAPORAN VERIFIKASI DATA BASE OMS

2022